ENEWSLETTER
PKS PARLEMEN
KREA
Edisi Maret I Tahun 2025 No. 58

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Kreatif Atraktif Substantif

Sudah Semestinya

Negara Muslim Memiliki Hak Veto di PBB

Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A

Nasihat Bagi Pemimpin

Pemimpin membangun kerjasama, sinergi dan kolaborasi serta membangun sistem yang baik. Kita tidak menciptakan superman, tapi kita menciptakan tim yang solid dan kuat karena sebaik-baik orang adalah yang mampu membangun tim yang kuat untuk kepentingan bersama. Di sini ada nilai dan semangat gotong royong

Sebaik-baik pemimpin adalah yang melayani rakyatnya. Bahasa pelayanan harus menjadi bahasa universal kepemimpinan dimana saja, apalagi dalam sistem demokrasi hari ini dimana pemimpin itu dari rakyat, dipilih oleh rakyat, maka harus bekerja untuk rakyat. Siapa rakyat kebanyakan? Mereka yang hidupnya biasa-biasa saja, pas pasan, bahkan sebagian dalam kemiskinan atau diambang kemiskinan. Ini yang jadi prioritas kebijakan agar kondisinya terangkat dan terberdaya.

Pemimpin membangun kerjasama, sinergi dan kolaborasi serta membangun sistem yang baik. Kita tidak menciptakan superman, tapi kita menciptakan tim yang solid dan kuat karena sebaik-baik orang adalah yang mampu membangun tim yang kuat untuk kepentingan bersama. Di sini ada nilai dan semangat gotong royong.

Kepemimpinan harus optimis sekaligis kreatif dan inovatif, sebagaimana seorang anak muda Salman Alfarisi yang menyarankan membangun parit saat Perang Khandaq dan harus jadi dalam enam hari enam malam. Panjang parit diperkirakan mencapai 5.544 meter, lebar 4,62 meter, dan kedalaman 3,2 meter. Disebutkan pula bahwa panjang parit itu sekitar 5.000 hasta dan lebarnya sembilan hasta. Maka, setiap 10 orang mendapat jatah untuk menggali sekitar 40 hasta.

Rasulullah SAW menerima usul anak muda cerdas itu padahal parit tidak ada dalam tradisi orang Arab dan strategi perang masa itu. Tapi harus ada strategi yang out of the box karena pasukan muslim hanya 3000 orang dan harus menghadapi pasukan quraisy 10.000 orang.

Pemimpin harus bisa merebut hati rakyatnya, kasbul qulub, memberi semangat yang tangguh pada mereka. Belajar dari Rasulullah, dalam kondisi yang sulit dan krisis Rasulullah mengatakan kita akan menaklukkan Persia, Syam, Syiria, Palestina. Hal itu tidak ada dalam imajinasi rakyatnya saat itu. Bagaimana mungkin?

Pemimpin harus merakyat, bukan tinggal di menara gading, tapi turun ke masyarakat. Sekali lagi kasbul qulub. Politisi, negarawan, sekaligus da'i ada dalam pemimpin. Murah senyum kepada rakyat karena senyum adalah sedekah. Berikan pelayanan terbaik. Jadilah pemimpin milik semua umat, milik semua kalangan, dan milik seluruh bangsa. Maka pemimpin itu akan dicinta rakyat dan bangsanya.

Pemimpin siap turun. Siap dimarahi bahkan harus siap dimaki. Tiap pernah mengeluh. Pemimpin tidak boleh ada rasa benci pada sesama. Kesabaran harus lebih besar. Yang sudah kasbul qulub pertahankan. Yang benci sekalipun ambil hati mereka. Mengambil hati jauh lebih baik daripada menang sendiri.

Pemimpin harus memudahkan bukan mempersulit. Harus memberi kabar bahagia bukan kabar sedih terus. Pemimpin di hadapan rakyat seperti orang tua bagi mereka. Anaknya macam-macam perilakunya, maka perlakuan kepada mereka juga berbeda-beda. Ada yang dinasehati dengan kata-kata cukup, ada yang dinasehati dengan tegas sedikit, ada yang harus disanksi. Sama seperti dokter, resepnya berbeda-beda untuk tiap pasien tergantung gejala dan hasil pemerikasaan.

Pemimpin harus saling ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan. Kata Sayyidina Ali r.a., suatu kebenaran tanpa aturan main yang jelas, atau tidak teratur, maka yang batil bisa mengalahkan yang haq. Pemimpin harus profesional, sesuai aturan, menempatkan seseorang pada tempat yang sesuai (fit and proper). Berbicara kepada mereka sesuai level amanah dan jabatannya.

Ketika Nabi ditinggal wafat Sayyidatuna Khadijah dan pamannya Abu Thalib, beliau pergi ke Thaif, dilempari batu hingga berdarah. Ketika tiba di satu kebun korma beliau duduk membersihkan darah, beliau berdoa mendoakan orang-orang yang zalim dan mengadu kepada Allah bukan keluh kesah tapi mengharap cinta-Nya. Pemimpin harus ada waktu-waktu mengadu kepada Allah, bukan menggantungkan pada diri sendiri dan timnya sehingga ujub dan takabur. Libatkan Allah dalam kepemimpinan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Kreatif Atraktif Substantif

SOSIAL MEDIA
Fraksi PKS DPR RI

Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A.
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Hj. Ledia Hanifa A., S.Si., M.Psi.T.
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

image istimewa

Aher Dorong Regulasi untuk Keamanan Laut di Indonesia

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Ahmad Heryawan, menyoroti berbagai permasalahan yang berkaitan dengan keamanan laut di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara.

Menurutnya, jalur laut yang panjang menjadi tantangan besar dalam upaya memberantas peredaran narkoba yang masuk ke Indonesia melalui jalur tersebut.

"Kemudian, yang tidak kalah penting juga di Provinsi Suma-tera Utara adalah masalah narkoba. Sebagaimana di provinsi-provinsi lain, mungkin ini harus jadi perhatian besar, karena garis pantai kita sangat panjang, sangat luas. Oleh karena itulah, seringkali narkoba masuk ke negeri kita melalui jalur laut. Itu tentu sangat merusak masa depan anak-anak generasi muda kita. Oleh karena itu, perlu ditangani segera," ujar Ahmad Heryawan melalui keterangan yang diterima, Sabtu (8/3/2025).

Ia mengungkapkan bahwa Komisi I DPR RI saat ini sedang membahas serta merancang pembentukan Panitia Kerja (Panja) guna menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan Laut. Rancangan Undang-Undang (RUU) ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia serta mengatasi berbagai ancaman yang datang dari laut.

"Alhamdulillah, Komisi I DPR RI sedang membincang-kan, sedang merencanakan, membuat Panitia Kerja (Panja) dalam merencanakan ke depannya, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang keaman-an laut. Bagaimanapun ini sangat penting. Laut kita perlu diamankan. Karena ternyata, ketika pengamanan laut belum kita optimalkan dengan baik, dampak negatifnya sangat panjang, sangat besar," tambahnya.

Selain permasalahan narkoba, legislator dapil Jawa Barat ini juga menyoroti mening-katnya jumlah pengungsi Rohingya yang tiba di wilayah Sumatera Utara melalui jalur laut. Menurutnya, Indonesia memiliki komitmen kemanusia-an yang tinggi dengan tetap menerima para pengungsi, meskipun negara-negara lain menolak mereka.

"Karena para pengungsi Rohingya, kemana-mana mereka ditolak. Bahkan, akibat penolakan itu, tidak sedikit me-reka yang tenggelam di lautan. Misalnya, datang ke negara A ditolak, tenggelam di lautan.

BERIKUTNYA »»

Aher Dorong Regulasi untuk Keamanan Laut di Indonesia

« SEBELUMNYA

Datang ke negara B ditolak juga. Datang kepada kita (negara Indonesia), Alhamdulillah kita masih menerima pengungsi Rohingya. Tetapi tentu saja, tidak hanya sampai pada penerimaan, tetapi ada penyelesaiannya. Penyelesaiannya melibatkan lembaga internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), kemudian dengan International Organization for Migration (IOM). Dan mudah-mudahan, beragam negara juga terlibat dalam penyelesaiannya, termasuk negara asalnya," jelasnya.

Di sisi lain, illegal fishing atau pencurian ikan secara ilegal juga menjadi perhatian DPR RI dalam pembahasan RUU Keamanan Laut. Praktik penangkapan ikan secara tidak bertanggung jawab dengan alat tangkap berbahaya, seperti pukat harimau, menyebabkan kerusakan ekosistem laut dan berkurangnya sumber protein bagi masyarakat Indonesia.

"Bagaimana memantau kapal-kapal besar yang melakukan kejahatan. Kejahatannya adalah mengambil semua jenis ikan, dari kecil sampai besar. Kalau jaringnya itu yang benar, hanya ikan-ikan yang besar yang terjaring. Tetapi, kalau jaringnya yang memiliki lubang-lubang kecil, seperti pukat harimau yang sering disebut, maka semua ikan akan terambil. Dampaknya, ikan-ikan yang kecil tidak memiliki kesempatan untuk berkembang. Dampaknya terhadap warga masyarakat yang kehilangan sumber protein. Dan itu dampaknya akan besar bagi masa depan masyarakat kita, khususnya generasi muda. Oleh karena itulah, illegal fishing ini menjadi perhatian besar dalam rangka pengamanan laut kita," tegasnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan bahwa keamanan laut bukan hanya menyangkut kedaulatan wilayah, tetapi juga berkaitan dengan kedaulatan sumber daya manusia (SDM). Ia menekankan bahwa tanpa pengamanan yang baik, Indonesia bisa mengalami ancaman serius dari berbagai sisi, termasuk dari aspek pertahanan dan ekonomi.

"Kedaulatan juga terkait dengan kedaulatan Sumber Daya Manusia (SDM). Bayangkan, apabila Sumber Daya Manusia (SDM) rusak gara-gara narkoba, kedaulatan kita, masa depan terancam. Untuk pertahanan keamanan negara juga terancam," bebernya.

Dengan adanya RUU Keamanan Laut yang sedang dirancang, sapaan akrab Aher ini berharap dapat menciptakan sistem pengamanan laut yang lebih baik guna melindungi Indonesia dari ancaman narkoba, illegal fishing, serta berbagai kejahatan lintas batas lainnya.

> "Kedaulatan juga terkait dengan kedaulatan Sumber Daya Manusia (SDM). Bayangkan, apabila Sumber Daya Manusia (SDM) rusak gara-gara narkoba, kedaulatan kita, masa depan terancam. Untuk pertahanan keamanan negara juga terancam,"
>
> **Dr. H. AHMAD HERYAWAN, Lc., M.Si.**
> Wakil Ketua Komisi I DPR RI

Pemerintah dan lembaga terkait juga diharapkan dapat berkolaborasi untuk mewujudkan keamanan maritim yang lebih efektif dan berkelanjutan.

"Oleh karena itulah, perlu ada sistem pengamanan laut kita dalam regulasi Undang-Undang (UU) yang sangat kuat untuk menjaga kedaulatan kita, agar daratan tersebut bukan hanya berarti bahwa kedaulatan tersebut, Indonesia terjaga. Bukan dijajah lagi," tutupnya

Habib Idrus: Revisi UU TNI Harus Jaga Profesionalisme dan Kepastian Hukum Prajurit

Jakarta (06/03) --- Komisi I DPR RI saat ini tengah membahas revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Pembahasan ini dilakukan dengan tujuan memastikan TNI tetap profesional, menjaga marwah institusi, serta memberikan yang terbaik bagi negara dan bangsa.

Dalam pembahasan yang berlangsung, muncul berbagai isu strategis, di antaranya mengenai batas usia pensiun prajurit TNI serta kemungkinan prajurit aktif menempati jabatan sipil tertentu.

Isu-isu ini menjadi perhatian publik dan membutuhkan kajian mendalam agar tidak menimbulkan polemik yang dapat berdampak negatif di masyarakat.

Anggota Komisi I DPR RI, Habib Idrus, menyoroti bahwa hingga saat ini belum ada kepastian terkait beberapa poin krusial dalam revisi UU TNI.

Habib Idrus menegaskan bahwa revisi ini harus berpihak kepada semua pemangku kepentingan serta disusun dengan mempertimbangkan kepentingan nasional.

"Kami ingin memastikan revisi UU TNI ini tidak hanya sekadar perubahan, tetapi benar-benar menjadi solusi untuk memperkuat profesionalisme TNI, menjaga netralitasnya, dan memberikan kepastian hukum bagi para prajurit. Jangan sampai revisi ini justru menimbulkan polemik yang tidak perlu," ujar Habib Idrus dalam Program PKS Legislatif Report Paripurna (PLR) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (06/03).

Komisi I DPR RI berkomitmen untuk melakukan pembahasan secara transparan dan mendalam dengan melibatkan seluruh pihak terkait.

DPR juga berharap, kata Habib Idrus, agar revisi UU TNI ini mampu memperkuat institusi pertahanan negara tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi sipil.

"Kami mengajak semua pihak untuk melihat revisi ini sebagai langkah positif dalam membangun institusi pertahanan yang lebih baik ke depan. Jangan sampai ada kepentingan tertentu yang justru mengaburkan tujuan utama dari revisi UU ini," tambah Anggota DPR RI dari Dapil Banten III ini.

Komisi I DPR RI akan terus mengawal proses revisi UU TNI dengan penuh tanggung jawab agar dapat menghasilkan regulasi yang tidak hanya bermanfaat bagi institusi TNI, tetapi juga bagi kepentingan nasional secara keseluruhan.

> “Kami mengajak semua pihak untuk melihat revisi ini sebagai langkah positif dalam membangun institusi pertahanan yang lebih baik ke depan. Jangan sampai ada kepentingan tertentu yang justru mengaburkan tujuan utama dari revisi UU ini,"
>
> **HABIB IDRUS SALIM ALJUFRI, Lc., M.B.A.**
> Anggota Komisi I DPR RI

image istimewa

Aleg PKS Ateng Ingatkan KemenPAN-RB Perbaiki Tata Kelola Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024

Jakarta (11/03) --- Anggota Komisi II DPR RI, Ateng Sutisna, mengingatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk segera memperbaiki tata kelola pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024.

Hal ini sejalan dengan kesimpulan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI bersama Menteri PANRB dan Kepala BKN RI pada Rabu (5/3).

Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR RI menegaskan bahwa pemerintah harus melakukan penataan dan penempatan ASN secara sistematis guna mendukung program prioritas pembangunan nasional.

Ateng meminta agar Kementerian PANRB menyelaraskan formasi, jabatan, dan penempatan ASN berdasarkan kompetensi serta talenta terbaik bangsa

"Fresh graduate akan diprioritaskan dalam proses ini untuk meningkatkan kualitas birokrasi menuju Indonesia Emas 2045," tegas Ateng.

Namun, Ateng juga menegaskan bahwa sebelum membuka rekrutmen baru, pemerintah harus menuntaskan terlebih dahulu pengangkatan tenaga non-ASN yang masih tersisa.

Menurutnya, tidak boleh ada pengangkatan CPNS, PPPK, atau tenaga honorer baru sampai seluruh tenaga kerja yang ada saat ini tuntas menjadi ASN.

Sepanjang masih ada tenaga non-ASN yang belum mendapatkan status kepegawaian tetap, rekrutmen baru dianggap belum diperlukan.

"Kementerian PANRB harus segera berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI agar melarang serta memberikan sanksi kepada kepala daerah yang tetap mengangkat tenaga non-ASN dengan skema lain dalam periode 2025-2030" jelas Ateng.

Ateng menekankan bahwa jika tenaga non-ASN yang ada saat ini dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan disiplin ilmu yang diperlukan, hanya ada dua pilihan yang bisa diambil.

"Pertama, mereka harus

BERIKUTNYA »»

Aleg PKS Ateng Ingatkan Kemen PAN-RB Perbaiki Tata Kelola Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024

« SEBELUMNYA

bersedia belajar cepat dan mengikuti berbagai pelatihan peningkatan kompetensi. Kedua, jika tidak mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan, maka mereka dapat memilih untuk mengundurkan diri secara sukarela," ujarnya.

Untuk mempercepat penataan CPNS dan PPPK formasi 2024, Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB dan BKN menyelesaikan pengangkatan CPNS pada Oktober 2025 serta pengangkatan PPPK pada Maret 2026.

Ateng juga menegaskan bahwa kebijakan afirmasi bagi tenaga non-ASN ini adalah yang terakhir, sehingga Kementerian PANRB dan BKN harus memastikan tidak ada lagi pengangkatan tenaga non-ASN di instansi pusat maupun daerah, sesuai amanat Pasal 66 UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Lebih lanjut, Ateng menyoroti bahwa dengan menyelesaikan terlebih dahulu pengangkatan tenaga non-ASN sebelum membuka rekrutmen baru, maka pemerintah dapat menghilangkan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pengangkatan pejabat baru.

Selain itu, langkah ini juga akan mencegah semakin panjangnya antrean tenaga kerja yang menunggu kepastian status kepegawaian.

"Seleksi harus berbasis meritokrasi, transparansi, dan tidak ada celah bagi pengangkatan tenaga honorer di luar aturan yang berlaku," tegas Ateng.

"Pemerintah harus serius dalam memperbaiki tata kelola kepegawaian agar sistem lebih tertata dan berkelanjutan," pungkasnya.

image istimewa

> “Seleksi harus berbasis meritokrasi, transparansi, dan tidak ada celah bagi pengangkatan tenaga honorer di luar aturan yang berlaku,"

Ir. H. ATENG SUTISNA
Anggota Komisi II DPR RI

Rahmat Saleh: Tidak Ada Keputusan CASN Harus Diangkat Serentak, Jangan Zalim!

Jakarta (10/03) --- Anggota Komisi II DPR RI Rahmat Saleh menegaskan tidak ada keputusan dalam Rapat Kerja Komisi II bersama KementerianPAN-RB dan BKN untuk mengangkat serentak Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), baik yang berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK).

la menegaskan bahwa salah satu hasil dari rapat kerja tersebut adalah bahwa KemenPAN-RB harus menyelesaikan pengangkatan CPNS pada Oktober 2025 dan CPPPK pada Maret 2026.

Keputusan tersebut diambil atas semangat untuk percepatan pengangkatan, dari yang semula usulan awal dari KementerianPAN-RB bahwa semua pengangkatan, baik CPNS maupun CPPPK, adalah di akhir 2026.

"Bisa dilakukan bertahap. Bahkan semangat rapat itu adalah semua sependapat niat kita adalah percepatan, bukan penundaan. Jadi ya misalnya PPPK yang sudah selesai, CPNS juga sudah bisa diangkat tahun ini," jelas Rahmat saat dihubungi Parlementaria, di Jakarta, Sabtu (08/03/2025).

"Tidak ada keputusan harus diangkat serentak itu," tambah Politisi Fraksi PKS ini.

Diketahui, penetapan pengangkatan serentak tersebut sebagai tertuang dalam Surat Edaran KemenPAN-RB bernomor B/1043/M.SM.01.00/2025.

Dengan adanya surat edaran tersebut, Rahmat menilai berarti KemenPAN-RB dan BKN mengambil batas waktu akhir maksimal di Bulan Oktober 2025 dan Maret 2026.

"Kalau begitu dia juga tidak melakukan pelanggaran rapat, tapi bijak apa tidak melakukan hal itu? Karena akan ada permasalahan yang ditimbulkan, seperti masalah yang sudah resign dari kerjaannya atau putus kontraknya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan penundaan datang dari 15 instansi pemerintah daerah (pemda) yang belum melakukan seleksi kompetensi bidang (SKB) CPNS 2024. Zudan menyebut ini terjadi di Papua imbas masalah keamanan usai pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Yang udah (harus segera diangkat), yang belum menyelesaikan jadi belakangan diangkatnya. Jangan menzalimi yang sudah selesai. Artinya ini tidak harus dilakukan pengangkatan serentak di Oktober," pungkas Rahmat.

> "Yang udah (harus segera diangkat), yang belum menyelesaikan jadi belakangan diangkatnya. Jangan menzalimi yang sudah selesai. Artinya ini tidak harus dilakukan pengangkatan serentak di Oktober,"
>
> **H. RAHMAT SALEH, S.Farm., M.IP**
> Anggota Komisi II DPR RI

KEAMANAN SIBER INDONESIA:
URGENSI REGULASI DAN ANCAMAN YANG MENGINTAI
1

Serangan siber semakin meningkat dan berdampak luas pada kehidupan sehari-hari serta stabilitas negara
Rumah Sakit Dharmais & Harapan Kita (2017)
Ransomware WannaCry menguncikan layanan kesehatan.
PDN Surabaya (2024)
Ransomware Brain Cipher, layanan imigrasi lumpuh
Serangan Rusia ke Ukraina:
Cyber attack sebagai pendahulu invasi fisik.
2

LEVEL SERANGAN SIBER
LEVEL I
LEVEL II
LEVEL III
LEVEL IV
STATISTIK SERANGAN SIBER DI INDONESIA
266,74
370,02
403
2,5
2021
2022
2023
Semester 1 -2024
3

TANTANGAN DALAM KEAMANAN SIBER INDONESIA
1. Regulasi tersebar & tidak terintegrasi
a. Regulasi sektoral: Siber Polri, Satsiber TNI, Siber BIN, Siber Komdigi, BSSN
b. Berbagai aturan berbeda seperti Permenhan No. 82/2014, Perpres No. 47/2023
c. Tidak ada satu payung hukum utama (UU Keamanan Siber)
2. Kurangnya koordinasi & leadership
Keamanan siber saat ini masih berjalan sektoral, perlu koordinasi lintas lembaga.
Solusi: Penguatan Payung Hukum Keamanan Siber
4

Tiga Pilar Penting Penyusunan Payung Hukum Keamanan Siber
1. Adaptasi Manajemen Resiko
2. Leadership & Sinkronisasi Koordinasi Nasional
3. Pemenuhan Standar & Prosedur Keamanan Siber
ISO 27000 (Standar Keamanan Informasi)
ISO 27001 (Sistem Manajemen Keamanan Informasi)
ISO 27005 (Manajemen Risiko Keamanan Informasi)
SNI IEC 62443 (Standar Keamanan Siber Nasional)
Audit & Security Check untuk sistem elektronik & PDN.
5

Keamanan Siber: Menjaga Negeri dari Bayangan Peretas
Sekarang kita berkejaran dengan waktu. Saat ini pun, mungkin sedang terjadi banyak peretas yang melakukan serangan ke ruang siber nasional kita. Maka, tidak ada waktu banyak, kita semua harus segera mewujudkan tata kelola keamanan dan ketahanan siber di negeri kita tercinta.
Dr. Sukamta
Anggota komisi I DPR RI

image istimewa

Komisi III FPKS Surahman Hidayat Apresiasi BNN Sita Aset Hasil Pencucian Uang Kasus Narkoba Senilai Rp 25 Miliar

Jakarta (05/03) --- Anggota komisi III DPR RI FPKS Surahman Hidayat menyampaikan apresiasinya kepada Badan Narkotika Nasional (BNN), PPATK dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena telah berhasil menyita aset hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas kasus narkoba, senilai Rp 25 miliar sejak Oktober 2024 hingga saat ini. kata Kepala BNN Marthinus Hukom dalam jumpa pers di Kantor BNN, Jakarta Timur, Senin (3/3/2025).

karena telah berhasil menyita aset hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas kasus narkoba, senilai Rp 25 miliar sejak Oktober 2024 hingga saat ini. kata Kepala BNN Marthinus Hukom dalam jumpa pers di Kantor BNN, Jakarta Timur, Senin (3/3/2025).

"Saya mengapresiasi langkah cepat dan tegas yang diambil oleh BNN beserta tim dalam mengungkap kasus ini. Hasil ini menunjukkan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) telah melakukan upaya serius dalam memerangi kejahatan narkoba, Ini merupakan langkah penting dalam memutus mata rantai kejahatan terorganisir dan mengurangi dampak ekonomi dari perdagangan narkoba,"ujar Surahman

Lebih lanjut surahman menyampaikan pentingnya untuk selalu berkolaborasi antar lembaga serta pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan narkoba, selain itu juga perlu adanya kejelasan kepada masyarakat terkait kelanjutan mekanisme pengelolaan aset yang telah di sita oleh pihak BNN.

"Keberhasilan ini menunjukkan pentingnya sinergi lintas lembaga, termasuk Polri, BNN, Kejaksaan Agung, PPATK, OJK, dan Kementerian terkait. Meskipun penyitaan aset merupakan langkah positif, perlu dipastikan bahwa proses hukum yang dilakukan transparan dan akuntabel. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas tentang bagaimana aset tersebut disita, diinvestigasi, dan akan dikelola selanjutnya, dan apakah ada mekanisme yang jelas untuk memastikan bahwa

BERIKUTNYA »»

Komisi III FPKS Surahman Hidayat Apresiasi BNN Sita Aset Hasil Pencucian Uang Kasus Narkoba Senilai Rp 25 Miliar

SEBELUMNYA

aset yang disita tidak disalahgunakan atau hilang dalam proses administrasi," papar Surahman

Legislator FPKS ini juga menyampaikan pentingnya edukasi yang intensif terkait bahaya narkoba dan pencucian hasil kejahatan narkoba kepada masyarakat terutama kepada generasi muda.

"Selain penindakan tegas, penting juga untuk memperluas akses rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba serta melakukan langkah preventif salah satunya adalah perlu ditingkatannya sosialisasi tentang bahaya narkoba dan pencucian uang terutama di kalangan generasi muda. kegiatan ini harus diintensifkan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba sejak dini," tambah Surahman

Terakhir Surahman menegaskan dukungannya pada upaya pemutusan jaringan narkoba serta menyampaikan pentingnya memberikan hukuman yang lebih berat bagi pelaku kejahatan narkoba terutama yang terlibat dalam pencucian uang.

"saya menyarankan agar DPR memperkuat regulasi terkait pencucian uang dan kejahatan narkoba dan juga mempertimbangkan revisi Undang-Undang Narkotika untuk memberikan sanksi yang lebih berat terhadap pelaku kejahatan narkoba, terutama yang terlibat dalam pencucian uang. Perlu juga meningkatkan koordinasi antara BNN, Kepolisian, Kejaksaan, PPATK, dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan bahwa upaya pemberantasan narkoba dan pencucian uang dilakukan secara terintegrasi dan efektif," ungkap Surahman

"DPR juga perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja BNN dan lembaga terkait dalam menangani kasus narkoba dan pencucian uang. Evaluasi rutin perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan efektif demi mewujudkan indonesia yang bebas narkoba," tutup Surahman

image istimewa

"Saya mengapresiasi langkah cepat dan tegas yang diambil oleh BNN beserta tim dalam mengungkap kasus ini. Hasil ini menunjukkan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) telah melakukan upaya serius dalam memerangi kejahatan narkoba, Ini merupakan langkah penting dalam memutus mata rantai kejahatan terorganisir dan mengurangi dampak ekonomi dari perdagangan narkoba,"

Dr. KH. SURAHMAN HIDAYAT, M.A.
Anggota Komisi III DPR RI

Aleg PKS Saadiah Dorong Implementasi Giant Cold Storage Guna Atasi Kelangkaan Ikan

Jakarta (09/03) --- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, mendorong pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera merealisasikan pembangunan Giant Cold Storage guna mengatasi ancaman kelangkaan ikan, khususnya di Ambon dan Makassar.

"Kelangkaan ikan di Ambon dan Makassar adalah anomali. Kedua daerah ini seharusnya menjadi lumbung ikan nasional yang andal, namun kenyataan menunjukkan sebaliknya," ujar Saadiah.

Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), potensi perikanan tangkap Indonesia mencapai sekitar 12,5 juta ton per tahun, tetapi baru dimanfaatkan sekitar 7,6 juta ton atau sekitar 61,5 persen. Infrastruktur yang belum memadai menghambat pemanfaatan potensi perikanan tersebut secara maksimal.

Menurut legislator asal Maluku ini, gagasan lumbung ikan nasional yang dicanangkan oleh Presiden sebelumnya, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, harus diperkuat dengan realisasi konkret di lapangan.

Saadiah juga menegaskan bahwa visi Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya cita kelima tentang hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam, sejalan dengan implementasi Giant Cold Storage sebagai solusi strategis.

"Pembangunan Giant Cold Storage menjadi kunci mengatasi persoalan distribusi dan memastikan stok ikan selalu tersedia dengan baik. Infrastruktur ini akan mampu menjaga kestabilan pasokan ikan serta menghindari lonjakan harga akibat kelangkaan," jelas Saadiah.

Keberadaan fasilitas Giant Cold Storage ini mampu menyimpan ikan hingga kapasitas ratusan ribu ton dalam jangka waktu lama, yang secara signifikan dapat memperkuat rantai pasok serta memberikan manfaat langsung kepada nelayan, industri perikanan, serta masyarakat secara luas.

Anggota Badan Anggaran DPR ini mendorong pemerintah untuk serius dalam mengalokasikan anggaran serta mempercepat proses pembangunan infrastruktur ini agar manfaatnya bisa segera dirasakan.

"Kami mendukung penuh agar pemerintah melalui KKP segera merealisasikan Giant Cold Storage ini agar kelangkaan ikan tidak terus berulang, sehingga ketahanan pangan laut nasional semakin terjamin," tutup Saadiah Uluputty.

> "Pembangunan Giant Cold Storage menjadi kunci mengatasi persoalan distribusi dan memastikan stok ikan selalu tersedia dengan baik. Infrastruktur ini akan mampu menjaga kestabilan pasokan ikan serta menghindari lonjakan harga akibat kelangkaan,"
>
> **SAADIAH ULUPUTTY, S.T**
> Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Maluku

Terima Audiensi ABK Korban TPPO Kapal Asing,

Aleg PKS Riyono Desak Penegakan Hukum dan Pelindungan ABK

Jakarta (04/03) --- Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Riyono menerima audiensi dari Destructive Fishing Watch (DFW) terkait dugaan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan kapal asing.

Kasus ini diduga melibatkan KM Mitra Usaha Semesta (KM MUS) yang menyelundupkan Anak Buah Kapal (ABK) ke kapal berbendera Rusia, Run Zeng 03 dan 05, yang dioperasikan oleh Warga Negara (WN) China.

Perwakilan DFW, Siti, mengungkapkan bahwa kasus ini tidak hanya melibatkan TPPO, tetapi juga dugaan tindak pidana lainnya seperti alih muat (transhipment) di tengah laut, penyelundupan 150 ton Bahan Bakar Minyak (BBM), dan penyelundupan 100 ton ikan. Kasus ini dianggap sebagai salah satu yang terbesar setelah kasus perbudakan di Benjina beberapa tahun lalu.

Salah satu korban TPPO, anusi menceritakan bahwa dirinya dan lebih dari 100 orang lainnya direkrut melalui media sosial dengan janji gaji yang bervariasi. Namun, setibanya di kapal, mereka tidak menerima sepeser pun.

"Kalau menolak atau batal, kami harus mengganti ongkos perjalanan. Kami dijanjikan gaji akan diterima di kapal yang katanya berbendera Indonesia. Nyatanya, kami dipindahkan ke kapal asing dan dipaksa bekerja dengan kondisi yang tidak manusiawi," ungkapnya.

Menurut Sanusi, para ABK yang mencoba menolak justru diancam dan tidak diberi makan jika tidak bekerja.

"Kami hanya diberi satu nampan makanan untuk 30 orang dan minum air dari AC. Enam orang nekat melompat ke laut untuk melarikan diri, lima orang selamat, tapi satu ditemukan dalam kondisi tanpa kepala setelah beberapa hari," tambahnya.

Menanggapi berbagai laporan ini, Anggota Komisi IV DPR RI F-PKS, Riyono menyatakan bahwa kasus eksploitasi ABK di kapal asing sudah menjadi perhatiannya sejak lama. Ia menegaskan bahwa Indonesia harus segera mengambil langkah konkret untuk mencegah kasus serupa terus berulang.

"Jika Indonesia tidak meratifikasi aturan internasional yang melindungi ABK, maka kejadian ini akan menjadi gunung es yang terus berulang. Dari 2020 hingga 2025, polanya tetap sama, bahkan bisa jadi pelakunya juga masih sama," ujar Riyono.

Menurutnya, hampir 250.000 ABK ilegal dari Indonesia rawan menjadi korban perbudakan di kapal ikan milik asing, terutama kapal berbendera China.

Sebagai tindak lanjut, Riyono menyampaikan beberapa langkah yang akan diambil, seperti koordinasi dengan Komisi III dan XIII DPR RI dan menyisipkan pembahasan terkait ABK dalam pembahasan UU Migran di Badan Legislasi.

"Ini merupakan kasus yang besar, karena sudah lintas komisi dan menyangkut banyak pihak. Oleh karenanya perlu kami konsolidasikan dengan rekan-rekan di Komisi III dan XIII untuk menemukan menindaklanjuti hingga nanti penyelesaian." pungkasnya

> "Jika Indonesia tidak meratifikasi aturan internasional yang melindungi ABK, maka kejadian ini akan menjadi gunung es yang terus berulang. Dari 2020 hingga 2025, polanya tetap sama, bahkan bisa jadi pelakunya juga masih sama,
>
> **RIYONO, S.Kel., M.Si.**
> Anggota Komisi IV DPR RI

image istimewa

Aleg PKS Slamet Ingatkan Kemenhut Selesaikan Alih Fungsi Hutan Mangrove PSN di Tangerang

Jakarta (03/03) –– Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, drh. Slamet, mengingatkan Kementerian Kehutanan untuk segera menyelesaikan kasus alih fungsi hutan mangrove yang digunakan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) di Tangerang.

Hal ini diungkapkan Slamet setelah selesai mengadakan Rapat Kerja dengan kementrian kehutanan di kompleks DPR/MPR RI senayan Jakarta.

Menurutnya, kasus ini jika tidak diselesaikan maka berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, terutama di awal pemerintahan yang baru terbentuk.

"Pemerintah saat ini memiliki harapan besar dari masyarakat untuk memperbaiki tata kelola lingkungan hidup, termasuk perlindungan hutan mangrove. Jika kasus ini tidak segera diselesaikan dengan baik, kepercayaan publik akan menurun, dan hal ini bisa menjadi preseden buruk bagi kebijakan lingkungan ke depan," ujar drh. Slamet di Jakarta.

Slamet menjelaskan bahwa persoalan alih fungsi hutan mangrove ini berawal dari revisi regulasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yang menghapus ketentuan bahwa perubahan peruntukan dan alih fungsi kawasan hutan harus mendapatkan persetujuan dari DPR.

Akibatnya, pengalihan fungsi hutan menjadi semakin tidak terkendali dan berpotensi merusak keseimbangan ekosistem.

"UU Cipta Kerja memberikan kelonggaran yang terlalu besar terhadap perubahan fungsi kawasan hutan. Hal ini berdampak pada semakin banyaknya alih fungsi lahan yang tidak mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan," tambahnya.

Hutan mangrove memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, termasuk sebagai benteng alami dari abrasi, tempat berkembang biaknya berbagai spesies perikanan, serta penyerap karbon yang efektif dalam mitigasi perubahan iklim.

Oleh karena itu, drh. Slamet menegaskan bahwa pemerintah harus bertindak tegas dalam menyelesaikan kasus ini dan memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Selain itu, ia juga mendesak Kementrian kehutanan untuk memperketat pengawasan terhadap proyek-proyek yang

BERIKUTNYA »»

Aleg PKS Slamet Ingatkan Kemenhut Selesaikan Alih Fungsi Hutan Mangrove PSN di Tangerang

SEBELUMNYA

berpotensi merusak ekosistem hutan mangrove.

Menurutnya, pembangunan harus tetap memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, di mana aspek ekonomi tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan.

"Pembangunan tidak boleh berjalan tanpa memperhatikan keseimbangan ekologi. Pemerintah harus berani meninjau ulang proyek-proyek yang berpotensi merusak lingkungan, termasuk PSN yang mengorbankan hutan mangrove," tegasnya.

Sebagai langkah konkret, Slamet meminta KLHK untuk segera melakukan audit lingkungan terhadap proyek-proyek yang berlokasi di kawasan hutan mangrove.

Hasil audit ini harus dipublikasikan secara transparan agar masyarakat dapat menilai sejauh mana komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Lebih lanjut, ia juga mengajak masyarakat dan organisasi lingkungan untuk turut serta dalam mengawasi dan melaporkan kasus-kasus alih fungsi hutan yang mencurigakan.

Partisipasi publik sangat penting untuk memastikan kebijakan pembangunan tetap berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

"Pemerintah harus membuka ruang dialog dengan masyarakat dan para ahli lingkungan dalam mengambil kebijakan terkait hutan dan lingkungan. Jangan sampai kita mewariskan bencana ekologi bagi generasi mendatang akibat kesalahan kebijakan hari ini," pungkasnya.

Dengan pernyataan ini, drh. Slamet berharap pemerintah, khususnya Kementrian Kehutanan, dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus ini dan mencegah dampak negatif yang lebih luas di masa mendatang.

image istimewa

"Pembangunan tidak boleh berjalan tanpa memperhatikan keseimbangan ekologi. Pemerintah harus berani meninjau ulang proyek-proyek yang berpotensi merusak lingkungan, termasuk PSN yang mengorbankan hutan mangrove,"

drh. H. SLAMET
Anggota Komisi IV DPR RI

Aleg PKS Johan Rosihan : Praktik Pengoplosan Beras Cederai Semangat Swasembada Pangan

Jakarta (05/03) --- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, mengecam keras dugaan praktik pengoplosan beras yang yang berpotensi merugikan konsumen dan mencoreng komitmen Presiden Prabowo dalam menjaga ketahanan pangan.

"Praktik seperti ini bukan hanya tindakan kecurangan yang merugikan rakyat, tetapi juga mencederai semangat swasembada pangan yang tengah dibangun oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Kita sedang berupaya keras untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan menekan ketergantungan pada impor, tetapi tindakan seperti ini justru melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem distribusi pangan nasional," ujar Johan dalam keterangannya, Selasa (05/03/2025).

Lebih lanjut, Johan menegaskan bahwa praktik pengoplosan beras juga berpotensi masuk dalam ranah korupsi dan manipulasi tata niaga pangan, sesuatu yang bertentangan dengan visi Presiden Prabowo dalam menegakkan transparansi dan pemberantasan korupsi di sektor pangan.

"Presiden Prabowo sudah jelas menyatakan komitmennya untuk memperbaiki sistem pangan nasional dan memberantas segala bentuk mafia pangan yang merugikan rakyat. Jika pengoplosan ini dibiarkan, maka kita sama saja memberi ruang bagi oknum yang ingin mempermainkan kebijakan pangan dengan cara yang curang dan tidak bertanggung jawab," tegasnya.

Komisi IV DPR RI mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan dan menindak tegas pihak yang terlibat dalam praktik ini. Johan juga meminta Satgas Pangan dan Kementerian Perdagangan untuk lebih aktif melakukan pengawasan terhadap distribusi beras di lapangan.

"Kami di Komisi IV akan mengawal persoalan ini. Aparat harus segera bertindak dan memastikan bahwa tidak ada celah bagi oknum yang mencoba mengambil keuntungan dengan cara-cara kotor seperti ini. Kita tidak ingin masyarakat menjadi korban dari permainan harga dan kualitas pangan yang tidak bertanggung jawab," tambahnya.

Selain itu, Johan juga mengajak masyarakat untuk lebih waspada dan proaktif melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan dalam distribusi pangan.

"Swasembada pangan hanya bisa terwujud jika semua pihak—pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat—sama-sama menjaga integritas dalam tata kelola pangan. Jangan biarkan ulah segelintir oknum merusak kepercayaan kita terhadap kedaulatan pangan yang sedang kita bangun bersama," tutupnya

"Kami di Komisi IV akan mengawal persoalan ini. Aparat harus segera bertindak dan memastikan bahwa tidak ada celah bagi oknum yang mencoba mengambil keuntungan dengan cara-cara kotor seperti ini.

H. JOHAN ROSIHAN, S.T
Anggota Komisi IV DPR RI

Komisi V FPKS Abdul Hadi Harap Pemerintah Siapkan Jalan Tol Aman dan Terjangkau bagi Pemudik

Jakarta (03/03) --- Anggota DPR RI Komisi V dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Hadi, menyampaikan harapannya agar pemerintah mempersiapkan infrastruktur jalan tol yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi para pemudik menjelang Lebaran 2025.

Pernyataan ini disampaikan Abdul Hadi di Gedung Parlemen Senayan Senin, (03/03/2025).

Abdul Hadi menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap kesiapan jalan tol menjelang musim mudik. Jalan tol merupakan jalur utama yang kerap mengalami kepadatan selama periode mudik. Sebagai contoh, pada musim mudik Lebaran 2024, volume lalu lintas di Jalan Tol Palikanci mencapai 76.693 kendaraan pada H-5 Lebaran, meningkat 229% dibandingkan hari normal.

Dalam kunjungan spesifik ke Tol Ciawi Bogor pada 27 Februari 2025 lalu, Abdul Hadi bersama rombongan Komisi V DPR RI menekankan kepada pemerintah untuk memperhatikan aspek keselamatan jalan tol.

Hal ini penting agar peristiwa kecelakaan fatal, seperti yang terjadi di Gerbang Tol Ciawi pada Februari 2025, tidak terulang. Kecelakaan tersebut melibatkan enam kendaraan dan mengakibatkan delapan korban jiwa.

Abdul Hadi juga menyoroti pentingnya penyelenggara jalan tol dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

"Kami mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan Rancangan Peraturan Menteri (Permen) tentang SPM Jalan, guna menggantikan Permen PU No. 16 Tahun 2014 tentang SPM Jalan Tol yang telah berlaku selama satu dekade," jelas Abdul Hadi.

Selain aspek keamanan, Abdul Hadi menekankan perlunya penyelenggara jalan tol memperhatikan kenyamanan pemudik. Penyediaan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) atau rest area yang memadai sangat penting untuk mencegah kelelahan yang dapat berujung pada kecelakaan.

Lebih lanjut, Abdul Hadi mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan penurunan tarif tol dengan memberikan diskon selama masa mudik.

"Jika memungkinkan, diskon yang diberikan sebaiknya lebih besar dari tahun sebelumnya. Penurunan tarif ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan perjalanan mudik serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan dan pemerataan ekonomi di daerah," ungkap Politisi PKS asal Lombok ini.

Abdul Hadi berharap langkah-langkah tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga masyarakat dapat merasakan perjalanan mudik yang aman, nyaman, dan terjangkau pada Lebaran 2025.

> "Jika memungkinkan, diskon yang diberikan sebaiknya lebih besar dari tahun sebelumnya. Penurunan tarif ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan perjalanan mudik serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan dan pemerataan ekonomi di daerah,"
>
> **ABDUL HADI, S.E., M.M.**
> Anggota Komisi V DPR RI

image istimewa

Anggota DPR Ingatkan Aplikator: Jangan Eksploitasi Pengemudi Ojol!

Jakarta (07/03) --- Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Reni Astuti mengingatkan agar tidak ada eksploitasi terhadap pengemudi ojek online.

Menurutnya, transportasi online kini menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang sulit mendapatkan pekerjaan, termasuk korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Bahwa memang mencari pekerjaan itu tidak mudah dan alternatif pilihan pekerjaan saat ini diantaranya adalah ojek online. Ketika basisnya adalah basis kemitraan, maka disana jangan sampai ada yang namanya eksploitasi," ujar Reni Astuti dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi V DPR RI dengan PT. Goto Gojek Tokopedia, PT. Grab Teknologi Indonesia dan PT. Teknologi Perdana Indonesia (Maxim Indonesia). Rabu (5/3/2025).

Reni mengatakan sistem kemitraan dalam transportasi online belum sepenuhnya berpihak pada kesejahteraan pengemudi.

Pernyataan ini berdasarkan pada pemotongan pendapatan pengemudi yang melebihi ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 Tahun 2019.

"Sebenarnya formula yang diatur di dalam Permenhub ini itu sejauh mana menurut aplikator? Karena faktanya kita sering melihat masih ada demo dari ojek online," tutur Reni.

"Misalkan ketika aplikator atau platform ini mengenakan potongan di atas yang diatur oleh Permenhub. Maksimal 20 persen, tapi bisa sampai kemudian dipotong (lebih)," imbuhnya

Reni juga menyoroti kontribusi transportasi online terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, yang disebut mencapai 2 persen dari PDB.

Dia menyebut kontribusi ini bukan hanya berasal dari aplikator, melainkan juga dari para pengemudi yang bekerja keras setiap hari.

"Kalau kemudian tadi disampaikan kontribusi 2 persen saya berpikir bahwa yang memberikan kontribusi 2 persen kepada negara, bisa jadi tidak hanya aplikator tapi para pengemudi online yang juga memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," pungkasnya.

> "Bahwa memang mencari pekerjaan itu tidak mudah dan alternatif pilihan pekerjaan saat ini diantaranya adalah ojek online. Ketika basisnya adalah basis kemitraan, maka disana jangan sampai ada yang namanya eksploitasi,"
>
> **RENI ASTUTI, S.Si., M.PSDM.**
> Anggota Komisi V DPR RI

Bahagia Menyambut

RAMADHAN KAREEM 1446 H

Ayo Saling Berbagi & Peduli

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

fraksi.pks.id | FPKS DPR RI | fraksipksdprri | @FPKSDPRRI | PKS TV DPR RI

Sambut Penurunan Harga Tiket, Ghufran: Minta Garuda Tambah Penerbangan ke Aceh

Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, H. Ghufran Zainal Abidin, menyambut positif kebijakan penurunan harga tiket pesawat Garuda Indonesia dan Citilink selama musim mudik Lebaran 2025. Namun, politikus asal Aceh itu mendesak maskapai nasional untuk menambah frekuensi penerbangan ke Provinsi Aceh guna memastikan aksesibilitas yang merata bagi masyarakat.

"Kebijakan penurunan harga tiket patut diapresiasi. Ini bukti komitmen pemerintah dan BUMN memudahkan mobilitas masyarakat, terutama warga di daerah terpencil seperti Aceh," ujar Ghufran dalam keterangan tertulis diterima Dialeksis.com, Senin (1/3).

Meski demikian, ia menegaskan bahwa langkah tersebut belum cukup tanpa diimbangi peningkatan ketersediaan jadwal penerbangan ke daerahnya.

Ghufran menyoroti minimnya frekuensi penerbangan Garuda Indonesia ke Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Aceh. Saat ini, maskapai hanya melayani satu penerbangan pagi dari Jakarta ke Aceh.

"Kami mendorong Garuda menambah penerbangan sore dari Jakarta ke Aceh, serta penerbangan pagi dari Aceh ke Jakarta. Dengan begitu, warga punya lebih banyak opsi waktu dan mengurangi beban antrean tiket," tegasnya.

Ia juga mengusulkan agar pesawat Garuda menginap (overnight) di Bandara SIM. "Jika pesawat bermalam di Aceh, penerbangan pagi ke Jakarta bisa dilakukan tepat waktu tanpa risiko delay. Ini solusi sederhana untuk meningkatkan kualitas layanan," tambahnya.

Ghufran menekankan, penambahan frekuensi penerbangan tidak hanya bermanfaat bagi pemudik, tetapi juga mendongkrak pariwisata dan perekonomian Aceh.

"Aceh memiliki destinasi unggulan seperti Masjid Baiturrahman, Taman Nasional Gunung Leuser, dan Pulau Weh. Akses transportasi yang baik akan menarik lebih banyak wisatawan, sekaligus membuka peluang bisnis bagi UMKM lokal," paparnya.

Menurutnya, penerbangan sore dari Jakarta ke Aceh juga dapat menjadi pilihan bagi wisatawan atau pemudik yang ingin tiba di malam hari, lalu beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan darat ke kabupaten-kabupaten di Aceh. "Ini akan mendistribusi kepadatan penumpang di bandara dan terminal," ujarnya.

> "Kami mendorong Garuda menambah penerbangan sore dari Jakarta ke Aceh, serta penerbangan pagi dari Aceh ke Jakarta. Dengan begitu, warga punya lebih banyak opsi waktu dan mengurangi beban antrean tiket,
>
> **GHUFRAN**
> Anggota Komisi VI DPR RI

Aleg PKS Amin Ak Dukung BUMN Kembangkan EBT Melalui Optimalisasi Bendungan dan Waduk

Jakarta (06/03) --- Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak, menyatakan dukungannya terhadap langkah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT).

Amin mengungkapkan hal itu menanggapi pertanyaan awak media di Jakarta, Kamis (6/3).

Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat dengan komisi VI, Rabu (5/3) kemarin, PT Brantas Abipraya Persero memaparkan rencana pengembangan EBT melalui optimalisasi bendungan dan waduk yang ada di Indonesia.

Menurut Amin, langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah mencapai target bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025 dan mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060.

"Presiden Prabowo sangat peduli dengan hal ini. Pembicaraan Presiden dengan sejumlah pemimpin negara sahabat antara lain mengenai pengembangan EBT," tutur Amin.

Lebih lanjut Wakil Ketua Fraksi PKS itu menyebutkan, Indonesia memiliki potensi EBT yang signifikan dengan total hampir mencapai 4 terawatt (TW).

Salah satu langkah strategis yang dapat diambil adalah pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung di atas permukaan waduk.

Data menunjukkan total kapasitas waduk di Indonesia bisa menghasilkan listrik tenaga surya hingga 14 gigawatt (GW) .

Selain itu, dari 248 bendungan yang telah dibangun, sebanyak 43 di antaranya memiliki potensi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebesar 255,15 megawatt (MW). Dan sebanyak 246 bendungan memiliki potensi PLTS terapung hingga 13,575 MW .

Untuk merealisasikan potensi tersebut, diperlukan investasi yang signifikan. BUMN bisa memanfaatkan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan sejumlah seperti Turki dan Qatar yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu.

Pemerintah telah menyetujui peningkatan kapasitas PLTS terapung di beberapa bendungan, yang diharapkan dapat menambah kapasitas hingga 14 GW.

Investasi ini tidak hanya akan meningkatkan kapasitas energi terbarukan nasional. Tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kolaborasi antara BUMN, seperti PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) serta PT Abipraya, dengan perusahaan swasta dan investor internasional sangat penting dalam pengembangan EBT.

Misalnya, PTBA telah melakukan diversifikasi bisnis ke sektor EBT untuk menjadi perusahaan energi dan kimia terintegrasi yang berkelanjutan.

Selain itu, PT PLN juga memperkuat sinergi dengan mitra domestik dan internasional untuk mengakselerasi pengembangan EBT .

Amin menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta dalam mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan waduk untuk pengembangan EBT.

Ia berharap langkah ini dapat mempercepat transisi energi bersih di Indonesia dan mencapai target bauran energi terbarukan yang telah ditetapkan.

Indonesia memiliki potensi EBT yang signifikan dengan total hampir mencapai 4 terawatt (TW). Salah satu langkah strategis yang dapat diambil adalah pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung di atas permukaan waduk.

AMIN AK,M.M.
Anggota Komisi VI DPR RI

HNW Usul Presiden Tabuh Beduk Malam Takbiran: Kemarin Entah ke Mana Itu

Jakarta (06/03) --- Anggota Komisi VIII DPR RI yang juga Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW), mengusulkan Presiden Prabowo Subianto melanjutkan tradisi menabuh beduk di malam takbiran atau menjelang Idul Fitri.

HNW ingin peringatan semacam itu bisa digelar kembali di Masjid Istiqlal atau Istana Negara.

Hal ini disampaikan HNW dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama. Ia menyampaikan usulannya ke Menag Nasaruddin Umar.

"Saya ingin mengusulkan Prof Nasaruddin Menteri Agama kita, kita sekarang berada di era baru dan ada selama bulan Ramadan ini menuju nanti Idul Fitri ada dua peristiwa yang sangat penting, yaitu salah satu daripada hari besar Islam, yaitu Nuzulul Qur'an dan yang kedua adalah malam takbiran Idul Fitri. Insyaallah nanti hari raya Idul Fitrinya bareng sehingga dengan demikian maka kekhawatiran berbeda itu tidak ada," kata HNW dalam rapat di DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (04/03/2025).

HNW berharap euforia masyarakat terhadap Idul Fitri hadir kembali. Ia ingin Presiden saat ini meneruskan tradisi tabuh beduk di Istana.

"Nah, yang ingin saya usulkan adalah dulu betapa umat itu sangat nyaman dengan menyambut hari raya Idul Fitri karena malam takbiran itu diselenggarakan bahkan di Istana atau di Istiqlal," ujar HNW.

"Presiden waktu itu bahkan ikut takbiran nabuh bedug. Jadi saya usulkan agar sunah ini dihidupkan kembali, Bapak. Jadi sunah hasanah ini akan hidup lagi untuk menghadirkan, masyaallah gitu ya, perasaan suka dan syukur akan hadirnya hari raya Idul Fitri," tambahnya.

Ia mengatakan peringatan Nuzulul Qur'an juga diharapkan dapat dilakukan kembali di Istana. Ia berharap sunah yang baik diteruskan oleh pemimpin RI.

"Dan yang kedua terkait dengan peringatan hari besar Islam dalam konteks ini adalah Nuzulul Qur'an. Dulu selalu Nuzulul Qur'an bahkan sejak zaman Presiden Sukarno sekalipun, hari-hari besar Islam itu juga diselenggarakan peringatannya di Istana Negara. Tapi kemarin entah ke mana itu, muter-muter di seluruh Indonesia," kata HNW.

Dia menyebutkan ada baiknya tradisi ini dihidupkan kembali. Menurutnya, hal ini akan disambut positif oleh masyarakat.

"Nah menurut saya sangat baik kalau kemudian ini dihidupkan kembali, sunah ini baik hidupkan lagi, sunah dari Istana Negara kemudian hari besar keagamaan itu diperingati dan itu akan memberikan nuansa yang sangat sangat positif," imbuhnya.

> "Presiden waktu itu bahkan ikut takbiran nabuh bedug. Jadi saya usulkan agar sunah ini dihidupkan kembali, Bapak. Jadi sunah hasanah ini akan hidup lagi untuk menghadirkan, masyaallah gitu ya, perasaan suka dan syukur akan hadirnya hari raya Idul Fitri,"
>
> **Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A**
> Anggota Komisi VIII DPR RI

DTSEN Diterapkan April 2025, DPR Sebut Akurasi Bansos Diperkuat, Koordinasi Lintas Sektor Jadi Kunci

Jakarta (10/03) --- Pemerintah Indonesia mengambil langkah upaya meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan mengimplementasikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) mulai April 2025.

Sistem ini diharapkan menjadi solusi fundamental atas permasalahan klasik penyaluran bansos yang kerap kali tidak tepat sasaran, dengan memanfaatkan data yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan terkini.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, menyambut baik kebijakan ini. Namun, Fikri menekankan urgensi koordinasi yang intensif antar berbagai pihak terkait dalam implementasi DTSEN.

"Bansos itu kan beragam jenisnya, tidak hanya yang dikelola Kemensos, tetapi juga dari Kemendikdasmen dan kementerian lainnya. Dengan adanya data tunggal ini, yang merupakan pengembangan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang sekarang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS), dan dengan banyaknya pengguna, koordinasi yang solid menjadi kunci keberhasilan," ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (10/3/2025).

Pria yang akrab disapa Fikri menambahkan bahwa ide dasar DTSEN sangatlah tepat, mengingat permasalahan utama bansos selama ini berkisar pada akurasi data. Dengan data yang lebih akurat dan mutakhir, diharapkan kecurigaan adanya politisasi bansos dapat diminimalkan secara signifikan.

"Jika data tunggalnya valid dan terpercaya, kesalahan sasaran akan berkurang drastis. Ditambah lagi dengan budaya verifikasi dan validasi yang dilakukan secara rutin, ini merupakan perkembangan yang sangat positif. Selanjutnya, kita harus memastikan bahwa data ini tidak disalahgunakan, sehingga masyarakat yang benar-benar berhak dapat menerima bantuan dengan layak," tegasnya.

Lebih lanjut, Fikri mengingatkan bahwa bansos adalah hak konstitusional warga negara, bukan sekadar belas kasihan.

"Bantuan sosial yang disalurkan pemerintah adalah hak warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Ini bukan soal kasihan, tetapi soal pemenuhan hak. Contohnya, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, itu adalah hak mereka untuk dientaskan dari kemiskinan, bukan semata-mata karena belas kasihan," jelas legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan (Dapil) IX Jateng ini.

Sehingga dia menyarankan, penyaluran bansos tidak sebatas berhenti pada pemberian saja, melainkan lanjut ke tahapan pemberdayaan penerima bansos.

Fikri juga mengapresiasi frekuensi pemutakhiran data DTSEN yang lebih sering, yaitu setiap tiga bulan sekali, dibandingkan dengan DTKS yang biasanya enam bulan sekali.

Namun, Fikri juga mengingatkan bahwa proses pemutakhiran data tidak boleh hanya mengandalkan pendamping PKH.

"Perlu melibatkan lebih banyak pihak dan sumber informasi dalam proses pemutakhiran data, yakni RT dan RW. Kolaborasi yang luas dan partisipasi aktif dari masyarakat sangat penting untuk memastikan data yang dihasilkan benar-benar akurat dan mencerminkan kondisi riil di lapangan" pungkasnya

> "Jika data tunggalnya valid dan terpercaya, kesalahan sasaran akan berkurang drastis. Ditambah lagi dengan budaya verifikasi dan validasi yang dilakukan secara rutin, ini merupakan perkembangan yang sangat positif.
>
> **Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM**
> Anggota Komisi VIII DPR RI

Tanggal Lahir :
13 Mei 1957

Dapil
Jawa Barat X

Keluarga
Istri : Dra. Hj. Cucu Nining
Anak: 4 Cucu: 4

Pendidikan
- SD Negeri 1 Sindanghayu, Ciamis, Jawa Barat (1963)
- PGAP PUI Banjarsari Ciamis, Jawa Barat (1970)
- PGAA PUI Cijantung Ciamis, Jawa Barat (1973)
- S1: Universitas Al Azhar Cairo Mesir (1989)
- S2: Universitas Al Azhar Cairo Mesir (1991)
- S3: Universitas Al Azhar Cairo Mesir (2001)

Pekerjaan
- Direktur Pusat Konsultan Syari'ah Jakarta
- Dewan Pengawas Syari'ah Bank Syari'ah Dki
- Dewan Pengawas Syariah Bumida Syari'ah
- Dewan Pembina PKPU
- Dosen Pasca Sarjana Universitas Islam Jakarta
- Dosen Pasca Sarjana Univ. Muhammadiyah Jakarta
- Pengasuh Ponpes Tahfizh SMA Tarbawi Zaid bin Tsabit
- Pengasuh Majelis Yas-alunaka Islam Solusi Kehidupan
- Anggota DPR RI (2009-2014), (2014-2019), (2019-2024), (2024-2029)

Dr. K.H. Surahman Hidayat Lc., M.A.

Riwayat Organisasi
- Dewan Kerja Cabang Pramuka
- Menwa
- HMI
- HPMI Mesir
- Poskolap Tim Penanggulangan Krisis Mahasiswa Indonesia di Mesir
- Badan Wakaf Mahasiswa Indonesia di Mesir
- Ikatan Dai Indonesia (IKADI)
- Pusat Konsultasi Syariah
- Syariah Economics dan Banking Institute
- Institut Manajemen Zakat

Publikasi Buku
- Yas Alunaka Islam Solusi Kehidupan jilid 1-3
- 4 Langkah Rezeki Berkah
- Islam Pluralisme Perdamaian
- Kerukunan Ber Masyarakat dalam Tuntunan Islam'
- Harmoni Muslim dan Non Muslim
- Etika Propetik Pejabat Publik
- Berpolitik Itu Ibadah
- Khutbah Tausiyah Plus jilid 1-3
- Jurnal Ekonomi Syariah
- Roadmap Qurani
- Ekonomi Syariah sebagai Ekonomi Gotong Royong.

Sosial Media
- Facebook
  surahmanhidayat.ma
- Instagram
  Rumah Aspirasi Haji Surahman
- Youtube
  Surahman Hidayat Official

Pailitnya PT. Sritex, Aleg PKS Netty Prasetiyani Minta Pemerintah Lindungi Hak Pekerja

Jakarta (05/03) --- Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani mengatakan bahwa keputusan pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang berimbas pada pemutusan hubungan kerja (PHK) ribuan pekerja menjadi pukulan berat bagi industri tekstil nasional dan ketenagakerjaan di sektor ini.

“Saya sangat prihatin dengan nasib para pekerja PT Sritex yang terdampak langsung akibat keputusan pailit ini. Mereka harus mendapatkan pelindungan dan kepastian atas hak-hak ketenagakerjaan mereka, terlebih dalam kondisi ekonomi yang sulit saat ini,” ujar Netty, Rabu, (05/03).

Sebagai langkah konkret, Netty menegaskan bahwa pekerja yang mengalami PHK berhak memperoleh manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025. Politikus PKS ini meminta pemerintah, melalui BPJS Ketenagakerjaan, harus memastikan bahwa pencairan manfaat JKP dapat dilakukan dengan mudah dan cepat.

“Kebutuhan masyarakat pasti meningkat saat Ramadhan ini dan apalagi menjelang Idul Fitri. Saya meminta BPJS TK agar pencairan JKP bagi pekerja terdampak dapat dilakukan secara praktis tanpa hambatan birokrasi yang berbelit. Jangan sampai mereka kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga,” ungkapnya.

Selain itu, Netty juga mendorong agar hak-hak pekerja yang masih dapat diupayakan tetap diperhatikan, termasuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).

“Meski saat ini pengelolaan Sritex berada di tangan kurator pasca putusan pailit yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), saya berharap ada upaya untuk memastikan pekerja tetap mendapatkan haknya, termasuk pembayaran THR menjelang Idul Fitri,” tegasnya.

Lebih lanjut, Netty juga mendukung langkah pemerintah dalam memperbaiki tata kelola industri tekstil agar sektor ini tetap berdaya saing dan mampu bertahan di tengah tantangan global.

"Perlu ada kebijakan yang lebih adaptif dan memberikan pelindungan bagi industri padat karya agar kasus serupa tidak terjadi lagi di masa depan," ujarnya.

“Saya mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah mitigatif terhadap industri lain yang memiliki risiko serupa. Jangan sampai pailitnya Sritex menjadi preseden bagi industri tekstil dan sektor lainnya. Diperlukan kebijakan yang lebih berpihak pada keberlanjutan industri dan pelindungan tenaga kerja,” tandas Netty.

> “Saya sangat prihatin dengan nasib para pekerja PT Sritex yang terdampak langsung akibat keputusan pailit ini. Mereka harus mendapatkan pelindungan dan kepastian atas hak-hak ketenagakerjaan mereka, terlebih dalam kondisi ekonomi yang sulit saat ini,”
>
> **Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si**
> Anggota Komisi IX DPR RI

Komisi IX FPKS Kurniasih Apresiasi BPJS Ketenagakerjaan Sudah Proses Cairkan JKP dan JHT Pekerja PT Sritex

Jakarta (06/03) --- Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengapresiasi BPJS Ketenagakerjaan yang merespons cepat harapannya agar pencairan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi pekerja PT Sritex segera dicairkan.

Sebelumnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Serikat Pekerja PT Sritex di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kurniasih menekankan agar pencairan JHT dan JKP bisa segera dilakukan sebelum lebaran.

"Alhamdulillah saya mendapat langsung laporan kalau BPJS Ketenagakerjaan sudah bergerak dengan proses pencarian untuk 1.000 orang per hari. Ditarget selama delapan hari akan selesai. Kami apresiasi langkah cepat dari BPJS Ketenagakerjaan ini," ungkap Kurniasih dalam keterangannya, Kamis (06/03/2025).

Kurniasih berharap, cepatnya proses pencairan ini dapat memberikan sedikit kelegaan bagi para pekerja yang terdampak, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Menurutnya, pencairan JKP dan JHT ini bukan sekadar hak yang harus diterima oleh pekerja, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian dan perlindungan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan agar tetap memiliki daya tahan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Kami berharap dengan percepatan ini, para pekerja yang terdampak bisa segera mendapatkan hak mereka dan dapat merencanakan kebutuhan finansialnya dengan lebih baik. Terlebih menjelang lebaran, tentu banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, mulai dari kebutuhan pokok hingga keperluan keluarga. Ini menjadi salah satu wujud kehadiran negara dalam melindungi hak-hak pekerja," tambahnya.

Selain itu, Kurniasih juga mendorong agar BPJS Ketenagakerjaan memastikan seluruh proses berjalan transparan dan akuntabel.

Ia menegaskan pentingnya mekanisme yang jelas dalam pencairan ini agar tidak ada pekerja yang haknya terhambat akibat kendala administratif atau teknis.

"Kami akan terus memantau proses ini agar sesuai dengan target penyelesaian dalam delapan hari. Kami juga meminta kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan pendampingan bagi pekerja yang mengalami kendala dalam proses pencairan, sehingga hak mereka dapat tersalurkan dengan baik dan tepat waktu," tutup Kurniasih.

> "Kami berharap dengan percepatan ini, para pekerja yang terdampak bisa segera mendapatkan hak mereka dan dapat merencanakan kebutuhan finansialnya dengan lebih baik. Terlebih menjelang lebaran, tentu banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, mulai dari kebutuhan pokok hingga keperluan keluarga. Ini menjadi salah satu wujud kehadiran negara dalam melindungi hak-hak pekerja,"
>
> **Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.**
> Anggota Komisi IX DPR RI

image istimewa

Legislator PKS Alifudin Minta Pemerintah Fokus Tangani Gelombang PHK Massal

Jakarta (04/03) --- Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Alifudin, menyampaikan keprihatinannya atas maraknya penutupan pabrik yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan pekerja.

Beberapa perusahaan yang dilaporkan terpaksa menutup operasionalnya dan merumahkan sekitar 3.200 pekerjanya antara lain PT Sanken Indonesia, PT Yamaha Music Product Asia, PT Tokai Kagu, PT Danbi Internasional Garut, dan PT Bapintri.

Bahkan, PT Sritex yang menutup pabriknya pada 1 Maret 2025 juga mengumumkan PHK massal terhadap 10.969 pekerja.

Alifudin mengungkapkan bahwa total lebih dari 14.000 pekerja telah dirumahkan akibat penutupan beberapa pabrik tersebut.

Ia menyatakan bahwa jumlah ini mencerminkan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama bagi keluarga-keluarga yang bergantung pada pendapatan dari pekerjaan mereka di pabrik-pabrik tersebut.

"Ini adalah masalah besar yang mempengaruhi tidak hanya pekerja yang dirumahkan, tetapi juga ekonomi lokal dan nasional. Pemerintah harus hadir untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja yang terkena PHK bisa terlindungi dengan baik," tegas Alifudin.

Politisi PKS ini juga menyoroti perincian PHK di beberapa perusahaan besar yang menutup operasionalnya, antara lain PT Sanken Indonesia dengan 459 pekerja yang terkena PHK, PT Yamaha Music Product Asia dengan 200 orang, dan PT Tokai Kagu dengan 195 orang.

Sementara itu, PT Danbi Internasional Garut, yang juga terdampak, mencatatkan PHK sebanyak 2.079 pekerja, dan PT Bapintri di Kota Cimahi sebanyak 267 pekerja.

Alifudin menyayangkan bahwa penutupan pabrik-pabrik besar ini terjadi dalam waktu yang berdekatan, meningkatkan kecemasan tentang gelombang PHK yang lebih luas.

Lebih lanjut, Alifudin mengingatkan bahwa situasi ini bukan hanya berdampak pada pekerja, namun juga berisiko memperburuk kondisi perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

"Jika tidak segera ditangani dengan serius, kondisi ini

BERIKUTNYA »»

Legislator PKS Alifudin Minta Pemerintah Fokus Tangani Gelombang PHK Massal

SEBELUMNYA

bisa memicu penurunan daya beli masyarakat dan merugikan perekonomian dalam jangka panjang. Pemerintah harus mampu menciptakan iklim industri yang stabil dan ramah bagi dunia usaha agar tidak terjadi PHK massal yang lebih meluas," ujar Alifudin.

Alifudin juga mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja yang terkena PHK dapat dipenuhi dengan baik dan utuh.

"Kemenaker harus segera turun tangan untuk memastikan pekerja yang terdampak memperoleh kompensasi yang sesuai, seperti pesangon dan hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tambahnya.

Alifudin menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses ini untuk mencegah potensi penyalahgunaan hak-hak pekerja.

Sebagai Anggota Komisi IX yang membidangi tenaga kerja, Alifudin menyatakan komitmennya untuk mendorong pemerintah agar segera mengambil langkah-langkah strategis guna melindungi pekerja dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Ia juga mengajak seluruh pihak, termasuk sektor swasta, serikat pekerja, dan lembaga terkait, untuk bekerja sama dalam mencari solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan ini.

Alifudin juga meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap iklim industri Indonesia, dengan melibatkan berbagai pihak terkait, guna menciptakan kebijakan yang mendukung kelangsungan industri tanpa mengorbankan kesejahteraan pekerja.

"Pemerintah perlu mendorong perkembangan sektor industri yang lebih berkelanjutan dan memperhatikan kepentingan pekerja. Kami tidak bisa membiarkan pabrik-pabrik terus menutup pintunya dan merumahkan ribuan pekerja," tegas Alifudin.

Sebagai langkah awal, Alifudin mengusulkan agar pemerintah mengidentifikasi sektor-sektor yang mengalami kesulitan dan memberikan insentif yang tepat untuk mempertahankan operasional pabrik-pabrik tersebut.

image istimewa

> “Jika tidak segera ditangani dengan serius, kondisi ini bisa memicu penurunan daya beli masyarakat dan merugikan perekonomian dalam jangka panjang. Pemerintah harus mampu menciptakan iklim industri yang stabil dan ramah bagi dunia usaha agar tidak terjadi PHK massal yang lebih meluas,"

H. ALIFUDIN, S.E.,M.M
Anggota Komisi IX DPR RI

DPR RI Bahas Revisi UU Perlindungan Pekerja Migran, PKS Usulkan Jaminan Pelaksanaan Ibadah

Jakarta (06/03) --- Komisi IX DPR RI saat ini tengah membahas perubahan ketiga Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Pembahasan ini dilakukan secara mendalam untuk memperkuat regulasi perlindungan bagi pekerja migran yang selama ini berkontribusi besar sebagai pahlawan devisa bagi Indonesia.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Achmad Ru'yat, yang juga merupakan anggota Komisi IX, mengusulkan tambahan klausul dalam Pasal 15 Ayat 2 Poin A.

"Klausul ini menegaskan adanya jaminan terhadap pelaksanaan ibadah bagi pekerja migran Indonesia di negara tempat mereka bekerja," ungkap Ru'yat.

Usulan ini, imbuhnya, bertujuan untuk memastikan bahwa hak fundamental pekerja migran dalam menjalankan keyakinan agamanya tetap terlindungi di luar negeri.

"Perlindungan pekerja migran tidak hanya sebatas aspek hukum dan ekonomi, tetapi juga mencakup hak-hak dasar seperti kebebasan beribadah. Oleh karena itu, kami mengusulkan agar dalam revisi ini dimasukkan klausul yang menjamin pemenuhan hak ibadah bagi pekerja migran," kata Achmad Ru'yat.

Menurut data Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, saat ini terdapat sekitar 5,2 juta pekerja migran Indonesia. Sementara itu, data dari Bank Dunia menunjukkan angka yang lebih tinggi, yakni mencapai 9 juta orang.

Perbedaan jumlah ini mengindikasikan masih banyaknya pekerja migran yang berangkat secara nonprosedural atau ilegal, yang membuat mereka lebih rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan pelanggaran hak.

Melalui perubahan UU ini, Komisi IX DPR RI berupaya memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran, terutama dalam memastikan hak-hak mereka terpenuhi, baik dari aspek keagamaan, kesejahteraan, maupun keamanan.

"Negara harus hadir dalam melindungi setiap pekerja migran, baik yang berangkat secara prosedural maupun yang masih belum memiliki legalitas yang jelas. Dengan revisi ini, kami berharap perlindungan terhadap mereka semakin kuat dan menyeluruh," tambah Achmad Ru'yat.

Pembahasan revisi UU ini diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang lebih komprehensif dan responsif terhadap tantangan yang dihadapi pekerja migran Indonesia di luar negeri, sehingga mereka mendapatkan perlindungan maksimal dari negara.

> "Negara harus hadir dalam melindungi setiap pekerja migran, baik yang berangkat secara prosedural maupun yang masih belum memiliki legalitas yang jelas. Dengan revisi ini, kami berharap perlindungan terhadap mereka semakin kuat dan menyeluruh,"
>
> **drh. H. ACHMAD RU'YAT, M.Si.**
> Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat V

Gamal Albinsaid Usul Pemain Naturalisasi Ikut Pelatihan Lemhanas: Demi Cinta Tanah Air

Jakarta (06/03) --- Anggota Komisi X DPR RI, Gamal Albinsaid, mengusulkan agar pemain naturalisasi Timnas Indonesia mengikuti pelatihan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) sebagai bagian dari penguatan nilai kebangsaan dan cinta Tanah Air.

Hal ini ia sampaikan dalam rapat kerja (raker) bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang membahas proses naturalisasi tiga calon penggawa Timnas Indonesia: Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupessy.

"Saya mau usul, mungkin pemain naturalisasi bisa ikut Lemhanas untuk penguatan nilai kebangsaan. Jadi, jiwa dan batinnya berjuang dengan penuh ketulusan dan cinta Tanah Air yang besar. Saya juga berharap ada efek domino," ujar Gamal dalam raker yang digelar di Gedung Parlemen DPR RI, Senayan, Rabu (5/3/2025).

Naturalisasi Bukan Sekadar Proses Administratif

Gamal menekankan pentingnya integrasi sosial dan budaya bagi pemain naturalisasi agar mereka benar-benar menyatu dengan masyarakat Indonesia. Menurutnya, hal ini bisa mempercepat adaptasi mereka di lingkungan Timnas maupun kehidupan sehari-hari.

Ia bahkan mengutip istilah yang sering digunakan Presiden RI ke-2, Soeharto, dalam menggambarkan percepatan adaptasi

"Terakhir, kita jangan lupa integrasi sosial dan budaya. Saya pinjam istilah Pak Harto, percepatan yang akseleratif sehingga pemain-pemain Timnas kita bisa menyatu dengan masyarakat Indonesia, termasuk Timnas lokal," lanjutnya.

Meski demikian, Gamal tetap memberikan dukungan penuh terhadap langkah PSSI dan Kemenpora dalam memperkuat sepak bola nasional melalui program naturalisasi.

"Kami sangat mendukung berbagai upaya Kemenpora dan PSSI dalam mendukung sepak bola kita, termasuk naturalisasi tiga pemain ini. Kami berharap program ini benar-benar meningkatkan kualitas Timnas kita dengan talenta internasional," kata Gamal.

Ia juga mengingatkan agar naturalisasi tak hanya berorientasi jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perkembangan talenta lokal dan kompetisi domestik.

"Naturalisasi ini harus bisa mengatasi kekurangan talenta lokal, meningkatkan persaingan di liga domestik, dan membawa Timnas kita ke level lebih tinggi," jelasnya.

> “Kami sangat mendukung berbagai upaya Kemenpora dan PSSI dalam mendukung sepak bola kita, termasuk naturalisasi tiga pemain ini. Kami berharap program ini benar-benar meningkatkan kualitas Timnas kita dengan talenta internasional,"
>
> **dr. GAMAL ALBINSAID**
> Anggota Fraksi PKS DPR RI Jawa Timur V

image istimewa

Komisi X FPKS Iqbal Ramzi Dukung dan Setuju Naturalisasi Pemain di Timnas Indonesia

Jakarta (06/03) --- Komisi X DPR RI telah melaksanakan Rapat Kerja bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Ketua Umum PSSI guna membahas usulan proses naturalisasi tiga pemain yang akan memperkuat Tim Nasional Indonesia di berbagai ajang internasional.

Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi di Komisi X sepakat untuk memberikan persetujuan atas usulan tersebut.

Dalam wawancara program PKS Legislatif Report (PLR) Paripurna, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Mohd Iqbal Ramzi, menegaskan bahwa keputusan ini merupakan wujud nyata keberpihakan terhadap kemajuan sepak bola nasional.

Menurutnya, kehadiran pemain-pemain naturalisasi yang memiliki keterkaitan keturunan dengan Indonesia dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas Timnas di kacamata dunia.

"Kami berharap Timnas Indonesia ke depan semakin diperhitungkan dalam kancah sepak bola internasional. Semangat untuk menang dalam setiap pertandingan harus terus ditanamkan, karena semangat inilah yang akan menggerakkan seluruh potensi para pemain kita," ujar Mohd Iqbal Ramzi.

Dengan adanya persetujuan ini, imbuhnya, diharapkan PSSI dapat terus meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia dan membangun tim nasional yang kompetitif di level global.

"Fraksi PKS berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan yang membawa kemajuan bagi dunia olahraga, khususnya sepak bola Tanah Air," tutup Iqbal.

> “Kami berharap Timnas Indonesia ke depan semakin diperhitungkan dalam kancah sepak bola internasional. Semangat untuk menang dalam setiap pertandingan harus terus ditanamkan, karena semangat inilah yang akan menggerakkan seluruh potensi para pemain kita,"
>
> **Drs. H. MOHD. IQBAL ROMZI**
> Anggota Komisi X DPR RI

PROGRAM UNGGULAN
FRAKSI PKS DPR RI

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Kreatif Atraktif Substantif

Parlementaria (Diskusi Publik,
PKS Legislative Corner, PKS Legislative Report,
Ruang Aleg dan Internshipks)

Diskusi, dialog, dan kolaborasi Fraksi PKS dengan pejabat publik, pakar, ahli, tokoh CSO, dan aktivis yang kompeten serta generasi muda untuk membahas, mengkaji, dan terlibat pada isu-isu publik dari sudut pandang parlemen.

image istimewa

> Hari-hari besar ke-Islaman seperti bulan Ramadhan ini, sejatinya menjadi momentum tahunan bagi Pemerintah untuk mendorong masyarakat muslim Indonesia meningkatkan aktivitas ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Seperti aktivitas investasi disektor produktif dengan menggunakan instrumen kerjasama usaha (musyarakah) maupun kemitraan modal (mudharabah)",
>
> **Dr. Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.**
> Anggota Komisi XI DPR RI

Aleg PKS Junaidi Auly: Ramadan Momentum Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Jakarta (03/03) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Junaidi Auly mengatakan aktivitas ekonomi berbasis nilai-nilai Islam diyakini memiliki peran penting bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi yang dimaksud bagi Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim, imbuh Junaidi, adalah pertumbuhan yang menghadirkan keadilan, keberkahan dan keseimbangan.

"Untuk itu, Hari-hari besar ke-Islaman seperti bulan Ramadhan ini, sejatinya menjadi momentum tahunan bagi Pemerintah untuk mendorong masyarakat muslim Indonesia meningkatkan aktivitas ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Seperti aktivitas investasi di sektor produktif dengan menggunakan instrumen kerjasama usaha (musyarakah) maupun kemitraan modal (mudharabah)", jelas Anggota Komisi XI DPR RI ini.

Di antara caranya, imbuh Junaidi adalah dengan mengoptimalkan kegiatan sosialisasi, literasi, dan dukungan layanan perbankan kepada masyarakat muslim Indonesia tentang transaksi keuangan yang adil dan inklusif serta bebas dari sifat spekulasi dan ketidakadilan.

"Tidak kalah pentingnya, semangat zakat, waqaf, dan shadaqah yang tumbuh dari masyarakat muslim Indonesia di bulan Ramadhan ini dapat membantu Pemerintah dalam program mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin", terang Anggota DPR RI dari Dapil Lampung.

Dengan demikian, tutup Junaidi, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi dapat diupayakan peningkatannya oleh Pemerintah pada akhir Triwulan I dan awal Triwulan II tahun 2025 melalui pendekatan dukungan sektor ekonomi inklusif dan transaksi berbasis real economic activity.

image istimewa

Aleg PKS Kholid Dukung Program Danantara sebagai Investasi Disertai Transparasi dan Akuntabilitas

Jakarta (06/03) --- Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Muhammad Kholid mendukung penuh program Danantara yang bisa mendorong strategi pertumbuhan ekonomi pemerintah yang lebih baik.

Hal tersebut diungkapkan Kholid dalam program PKS Legislatif Report (PLR) Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (06/03).

Kholid menegaskan program danantara merupakan ikhiti-ar yang dilakukan Presiden Prabowo beserta pemerintahannya.

Menurut Muhammad Kholid kunci keberhasilan Danantara itu adalah yang pertama dari sisi government (tata kelola pemerintah).

"Jadi good government adalah keniscayaan yang harus kita bangun, program Danantara harus dengan prinsip- prinsip transparasi, akuntabilitas sebab trans dan legistimasi publik itu number one, dan merupakan hal yang basic," tutur Kholid.

Kabarnya, lanjut Kholid, di periode pertama Danantara mengelola dana sebesar 20 Milliar USD, ini merupakan hasil dari efisiensi APBN.

"Danantara harus dikelola dengan akuntabel, clean, independent dan tidak ter-interversi oleh politik", tegasnya.

"Pengelolaan yang profesional sebagai entitas bisnis sebagai investasi yang menghasilkan, diharapkan instrumen Danatara ini mendapatkan tingkat efisiensi dan efektivitas dalam investasi, lalu yang kedua adalah strategi investasi harus dikelola dengan baik dengan memperhatikan resiko yang rendah maupun tinggi", tutupnya.

> "Danantara harus dikelola dengan akuntabel, clean, independent dan tidak ter-interversi oleh politik. Pengelolaan yang profesional sebagai entitas bisnis sebagai investasi yang menghasilkan, diharapkan instrumen Danatara ini mendapatkan tingkat efisiensi dan efektivitas dalam investasi, lalu yang kedua adalah strategi investasi harus dikelola dengan baik dengan memperhatikan resiko yang rendah maupun tinggi"

H. MUHAMMAD KHOLID, S.E., M.Si.
Anggota Komisi XI DPR RI

image istimewa

Komisi XI FPKS Anis Byarwati Pantau Stabilitas Ekonomi Jelang Ramadan dan Idul Fitri

Jakarta (07/03) --- Komisi XI DPR RI menegaskan komitmennya dalam memastikan stabilitas daya beli masyarakat dan harga bahan pokok menjelang Ramadan dan Idul Fitri.

Anggota Komisi XI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyampaikan bahwa pihaknya terus mencermati kondisi ekonomi guna memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok tanpa kesulitan.

"Kami memantau daya beli masyarakat dan harga-harga di pasar agar tetap stabil. Kami ingin memastikan masyarakat bisa menjalani Ramadan dan merayakan Idul Fitri dengan tenang, tanpa terbebani lonjakan harga bahan pokok," ujar Anis Byarwati.

Sebagai komisi yang membidangi ekonomi, keuangan, dan perbankan, Komisi XI DPR RI akan terus mengawasi kebijakan ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

"Langkah ini mencakup koordinasi dengan pihak terkait untuk menjaga stabilitas harga serta memastikan pasokan bahan pokok tetap tersedia dan terjangkau," ujarnya.

Anggota DPR RI dari Dapil Jakarta I ini akan terus mengawal kebijakan ekonomi agar tetap berpihak kepada masyarakat, terutama dalam menghadapi momen-momen penting seperti Ramadan dan Idul Fitri.

> “Kami memantau daya beli masyarakat dan harga-harga di pasar agar tetap stabil. Kami ingin memastikan masyarakat bisa menjalani Ramadan dan merayakan Idul Fitri dengan tenang, tanpa terbebani lonjakan harga bahan pokok,"
>
> **Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si**
> Anggota Komisi XI DPR RI

image istimewa

Legislator PKS Dorong Penguatan LPSK dan 'Victims Trust Fund' dalam Revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban

Jakarta (05/03) --- Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mohamad Sohibul Iman, menegaskan pentingnya penguatan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK).

Menurutnya, LPSK harus memiliki kedudukan yang lebih kuat dalam sistem hukum pidana dan berperan sebagai bagian dari aparat penegak hukum.

"Kita sepakat bahwa LPSK harus lebih kuat, baik dalam perannya yang bersifat remedial maupun sanctional. Karena itu, revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban harus diharmonisasi dengan revisi KUHAP agar sistem hukum kita lebih terintegrasi. Komisi XIII DPR harus mendorong agar LPSK dilibatkan dalam proses pembahasan ini," ujar Sohibul Iman dalam rapat pembahasan di Komisi XIII DPR

Selain itu, ia juga mengapresiasi gagasan pembentukan Victims Trust Fund atau Dana Abadi Korban sebagai solusi atas rendahnya realisasi restitusi bagi korban kejahatan.

Menurutnya, mekanisme saat ini belum efektif karena hanya sekitar 2% korban yang menerima haknya.

"Jika kita ingin memastikan korban benar-benar mendapatkan haknya, maka mekanisme restitusi harus diperbaiki. Dana Abadi Korban ini memungkinkan restitusi diberikan langsung oleh badan pengelola dana korban, sementara penuntut menagihnya kepada pelaku. Jika pelaku tidak mampu membayar, maka itu menjadi utang kepada badan pengelola. Ini skema yang masuk akal dan perlu kita perjuangkan dalam revisi UU ini," tegas pria kelahiran Tasikmalaya tersebut.

Fraksi PKS berharap revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban ini dapat memberikan perlindungan yang lebih maksimal bagi korban, dengan sistem yang lebih jelas, terstruktur, dan mampu menjangkau seluruh daerah.

"Jika kita ingin memastikan korban benar-benar mendapatkan haknya, maka mekanisme restitusi harus diperbaiki. Dana Abadi Korban ini memungkinkan restitusi diberikan langsung oleh badan pengelola dana korban, sementara penuntut menagihnya kepada pelaku. Jika pelaku tidak mampu membayar, maka itu menjadi utang kepada badan pengelola. Ini skema yang masuk akal dan perlu kita perjuangkan dalam revisi UU ini"

MOHAMAD SOHIBUL IMAN, M.Eng., Ph.D.
Anggota Komisi XIII DPR RI

BERITA FOTO

Dr. Hj. Netty Prasetiyani, M.Si.

Ketua BAM DPR RI Pantau Ketersediaan Pangan

Bandung (08/03) --- Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani melakukan kunjungan kerja ke Pasar Kosambi, Kota Bandung, dalam rangka memantau ketahanan, ketersediaan, dan stabilitas harga pangan. pada Kamis, (06/03/2025). Dalam kunjungan ini, Anggota BAM DPR RI berdialog dengan para pedagang dan pembeli terkait dinamika harga komoditas seperti beras, minyak goreng, daging, telur, dan sayur-mayur.

BAM DPR FPKS Muh Haris Pastikan Pasokan Barang, Stabilitas Harga, dan Kualitas Produk Ramadhan Terjangkau

Bandung (07/03) --- Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI dari Fraksi PKS, Muh Haris, bersama rombongan BAM DPR RI, melakukan kunjungan kerja ke Pasar Kosambi, Kota Bandung,

serta mengadakan pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat yang diwakili oleh Kepala Dinas Perdagangan, beserta pimpinan SKPD terkait.

Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pasokan barang, stabilitas harga, serta kualitas produk yang beredar di pasaran menjelang bulan suci Ramadhan.

Dalam kunjungan ke Pasar Kosambi, Muh Haris dan anggota BAM DPR RI meninjau langsung kondisi pasar dan berbincang dengan pedagang serta pembeli mengenai harga dan ketersediaan bahan pokok.

Ia menegaskan bahwa pasokan barang harus tetap tersedia dalam jumlah cukup, harga tetap terjangkau bagi masyarakat, serta kualitas produk terjamin guna menjamin keamanan konsumsi selama Ramadhan.

"Kami ingin memastikan tiga hal utama: pasokan harus ada, harga harus tetap terjangkau, dan kualitas produk harus terjaga. Jangan sampai ada permainan harga atau kelangkaan barang yang bisa menyulitkan masyarakat, terutama menjelang Ramadhan yang identik dengan meningkatnya kebutuhan bahan pokok," ujar Muh Haris.

Setelah meninjau pasar, rombongan BAM DPR RI melanjutkan pertemuan di Kantor Gubernur Jawa Barat bersama Kepala Dinas Perdagangan Jawa Barat dan jajaran terkait.

Dalam pertemuan tersebut, BAM DPR RI meminta laporan mengenai langkah-langkah konkret yang telah disiapkan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi lonjakan harga dan permintaan barang selama bulan puasa.

Kepala Dinas Perdagangan Jawa Barat menyampaikan bahwa Pemprov Jabar telah menyiapkan sejumlah strategi, termasuk operasi pasar murah, pengawasan distribusi barang untuk mencegah praktik penimbunan, serta koordinasi intensif dengan distributor guna memastikan stok bahan pokok mencukupi dengan harga yang tetap stabil.

Muh Haris menegaskan bahwa BAM DPR RI akan terus mengawal kebijakan pemerintah daerah dan pusat agar benar-benar berpihak kepada masyarakat.

"Pemerintah harus hadir dalam situasi ini. Kami dari BAM DPR RI akan terus memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berjalan efektif untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam hal pangan selama Ramadhan," tambahnya.

Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, diharapkan stabilitas pasokan, harga, dan kualitas barang di pasar dapat terjaga dengan baik, sehingga masyarakat bisa menjalankan ibadah puasa dengan lebih nyaman dan tenang.

> "Kami ingin memastikan tiga hal utama: pasokan harus ada, harga harus tetap terjangkau, dan kualitas produk harus terjaga. Jangan sampai ada permainan harga atau kelangkaan barang yang bisa menyulitkan masyarakat, terutama menjelang Ramadhan yang identik dengan meningkatnya kebutuhan bahan pokok,"
>
> **Dr. H. MUH. HARIS, S.S., M.Si.**
> Anggota Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI

image istimewa

> “Kami akan menyampaikan temuan ini kepada pemerintah dan pihak terkait agar ada langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga pangan. BAM DPR RI juga mendorong penguatan peran Bulog dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga pasokan pangan,"
>
> **Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si**
> Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI

BAM DPR FPKS Netty Pantau Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan di Pasar Kosambi

Bandung (08/03) –- Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu isu strategis yang menjadi perhatian utama BAM DPR RI.

"Kami ingin memastikan bahwa masyarakat tidak terbebani dengan lonjakan harga pangan, terutama saat Ramadhan dan jelang Idul Fitri. Kami juga mendengar langsung keluhan pedagang mengenai pasokan barang serta stabilitas harga," ujarnya, Kamis, (06/03/2025) saat melakukan kunjungan kerja ke Pasar Kosambi, Kota Bandung, dalam rangka memantau ketahanan, ketersediaan, dan stabilitas harga pangan.

"Kunjungan ini juga bertujuan untuk menyerap aspirasi pedagang serta memastikan harga bahan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat," tambahnya.

Dalam kunjungan ini, Anggota BAM DPR RI berdialog dengan para pedagang dan pembeli terkait dinamika harga komoditas seperti beras, minyak goreng, daging, telur, dan sayur-mayur.

"Sejumlah pedagang menyampaikan adanya fluktuasi harga yang dipengaruhi oleh berbagai kondisi seperti cuaca dan juga meningkatnya konsumsi masyarakat saat Ramadhan," ungkapnya.

"Kami akan menyampaikan temuan ini kepada pemerintah dan pihak terkait agar ada langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga pangan. BAM DPR RI juga mendorong penguatan peran Bulog dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga pasokan pangan," tambah Netty.

Netty Prasetiyani dan anggota BAM lainnya turut berbelanja sejumlah komoditi pangan segar, bahan pokok, daging sapi, telur, daging ayam, dan buah.

image istimewa

Kunjungan ke Singapura, Mardani Ali Sera: Temasek Sukses karena Integritas

Jakarta (10/03) --- Ketua BKSAP (Badan Kerja Sama Antar Parlemen) DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menyebut kesuksesan Temasek adalah karena mengutamakan integritas, lepas dari politik dan benar-benar independen mengelola keuangan investor.

''Dari Temasek kita belajar tentang integritas. Beberapa kali mereka menyebut bahwa menerapkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja maksimal sehingga tercipta trust dari semua pihak. Pun, pemerintahnya menerapkan kepastian hukum yang membuat para investor semakin yakin mempercayakan Temasek dalam berinvestasi. Perpaduan super; Temasek yang berintegritas dan pemerintah yang sungguh-sungguh," ujar Mardani menyimpulkan.

Mardani memimpin delegasi melakukan kunjungan ke Temasek di Singapura dalam rangka penjajakan investasi dan proses pembelajaran secara langsung untuk dibawa, dipelajari, dan diterapkan ke Indonesia.

Pada kesempatan itu, Mardani secara langsung meminta masukan Temasek berkaitan pembentukan Danantara di Indonesia.

''Sebagai lembaga yang besar, Temasek yang telah berdiri sejak 1974, maka kami meminta saran, masukan berkaitan tentang program Danantara yang sedang diusahakan oleh Bapak Presiden Prabowo. Semoga bisa menyamai Temasek, bahkan melebihi Temasek di masa yang akan datang," tanya Mardani, yang juga anggota Komisi II DPR RI ini.

Menjawab pertanyaan delegasi BKSAP, Temasek menjelaskan bahwa inti dari pengelolaan finansial adalah; kepercayaan, akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum. tanpa adanya hal-hal tersebut, maka jangankan negara lain, masyarakat sendiripun akan sulit menerima keberadaan kita untuk mengelola uang mereka.

"Kami menekankan keempat hal tersebut dalam pengelolaan keuangan kami, sehingga publik percaya dan berani investasi kepada kami. Dan memang itu butuh waktu, kami saja lima puluh tahun untuk mencapai di titik ini dan akan terus berjuang demi kepercayaan publik, juga dari dalam kami mencoba transparan, serta Pemerintah

BERIKUTNYA »»

Kunjungan ke Singapura, Mardani Ali Sera: Temasek Sukses karena Integritas

SEBELUMNYA

memberi kepastian hukum yang jelas atas investasi yang masuk, seberapa pun nilainya.'' ujar Ashok Mirpury.

Temasek adalah lembaga keuangan di Singapura yang telah berdiri selama hampir lima puluh tahun.

Kemampuannya mengelola keuangan di SIngapura tak hanya dipercaya oleh publik negara tersebut, namun juga oleh investor-investor negara lain di dunia.

Bahkan disinyalir beberapa investasi di Indonesia justru melalui Singapura (Temasek), sebagai bukti penting dan besarnya kepercayaan negara-negara lain atas Temasek.

Kunjungan ke Temasek adalah rangkaian kegiatan kunjungan diplomatik yang dilakukan Pimpinan BKSAP DPR RI ke beberapa negara ASEAN pasca dibentuknya GKSB (Grup Kerja Sama Bilateral) oleh ketua DPR RI, Puan Maharani.

''BKSAP merasa dan meyakini negara-negara ASEAN adalah bagian penting buat kami, karenanya GKSB ini (negara-negara ASEAN), langsung di bawah kami, pimpinan DPR RI. dan Temasek adalah bagian penting kunjungan untuk proses pembelajaran kami untuk dibawa ke Indonesia'' ujar Mardani.

Singapura menjadi negara pertama yang dikunjungi oleh seluruh pimpinan BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera (Ketua BKSAP, dari FPKS), dan tiga wakil ketua; Bramantyo Suwondo (Fraksi Partai Demokrat), Muhammad Husein Fadlulloh (Fraksi Gerindra), Ravindra Airlangga (Fraksi Golkar), Irine Yusiana Roba Putri (Fraksi PDI-P).

image istimewa

''Sebagai lembaga yang besar, Temasek yang telah berdiri sejak 1974, maka kami meminta saran, masukan berkaitan tentang program Danantara yang sedang diusahakan oleh Bapak Presiden Prabowo. Semoga bisa menyamai Temasek, bahkan melebihi Temasek di masa yang akan datang

Dr. H. MARDANI, M.Eng
Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI

image istimewa

Setuju 10 RUU Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo, Sultra dan Sulut

Fraksi PKS Dukung Pemerataan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

Jakarta (05/03) --- Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKS, Achmad Ru'yat menyampaikan pandangan Fraksi PKS DPR RI terhadap 10 (Sepuluh) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Sulawesi Utara.

al tersebut disampaikan dalam Rapat Baleg DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (05/03).

"Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait 10 (Sepuluh) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Sulawesi Utara," ungkap Anggota Komisi IX DPR RI ini.

Pertama, imbuhnya, Fraksi PKS menilai bahwa dasar hukum pembentukan 10 Kabupaten/Kota dibuat pada masa pemerintahan RIS yaitu Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) pada tahun 1950.

"Oleh karena itu, 10 RUU ini perlu disusun agar dasar hukum dari 10 Kabupaten/Kota menyesuaikan dengan konsep otonomi daerah dan perkembangan ketatanegaraan di Indonesia yang sejalan dengan UUD NRI Tahun 1945 dalam kerangka NKRI," ungkapnya.

Kedua, lanjut Ru'yat, Fraksi PKS melihat bahwa ketentuan tentang 10 Kabupaten/Kota tersebut belum diatur oleh undang-undang tersendiri.

"Selama ini, Kabupaten/Kota tersebut, masih menggunakan dasar hukum provinsi lama. Dengan demikian, RUU ini perlu disusun agar masing-masing Kabupaten/Kota diatur dengan Undang-Undang tersendiri sebagaimana amanat Pasal 18 ayat 1 UUD NRI 1945 yang menyebutkan, 'Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap tiap provinsi kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang'," jelas Ru'yat.

Ketiga, kata Ru'yat, Fraksi PKS menilai bahwa RUU ini tidak membahas soal pemekaran tapi hanya menegaskan cakupan wilayah kecamatan, Hari lahir/Hari Jadi dan kedudukan ibukota.

BERIKUTNYA »»

Setuju 10 RUU Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo, Sultra dan Sulut, Fraksi PKS Dukung Pemerataan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

SEBELUMNYA

"RUU ini menegaskan dan memberikan pengakuan terhadap karakteristik masing-masing Kabupaten/Kota dengan ciri geografis, potensi sumber daya alam, dan budaya. Oleh karena itu, Fraksi PKS sepakat dengan pengaturan dalam 10 (Sepuluh) Rancangan Undang-Undang pada Provinsi-provinsi tersebut yang menekankan pada penegasan dasar hukum, batas wilayah, karakteristik wilayah, serta suku bangsa dan budaya," jelasnya.

Keempat, lanjutnya, Fraksi PKS berharap bahwa penyusunan 10 (Sepuluh) RUU tentang Kabupaten/Kota ini tetap mempertimbangkan aspek kesejahteraan, keberagaman masyarakat, baik keberagaman suku, agama, dan ras serta antar golongan dan juga kearifan lokal yang berfungsi sebagai ketahanan budaya masyarakat setempat.

"Kelima, Fraksi PKS berharap agar pengelolaan dan pengembangan potensi daerah mempertimbangkan karakteristik wilayah dari 10 (Sepuluh) Kabupaten/Kota tersebut. Bagi Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah pesisir dan kepulauan harus memiliki prioritas pembangunan di bidang kelautan dan perikanan. Bagi Kabupaten/Kota yang memiliki karakteristik wilayah dataran rendah dan pegunungan yang memiliki tanah yang subur harus memprioritaskan pembangunan di bidang pertanian dan perkebunan. Bagi Kabupaten/Kota yang memiliki potensi sumber daya alam harus memprioritaskan pengelolaan yang mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan pengelolaan yang berkelanjutan," urainya.

image istimewa

Keenam, lanjut Ru'yat, Fraksi PKS sepakat bahwa RUU ini tidak mengatur masalah kewenangan yang berpotensi bertentangan dengan sejumlah Undang-Undang lain, misalnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dan masalah batas daerah yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Hal ini agar tidak menciptakan masalah baru berupa ketidakpastian hukum akibat adanya peraturan yang saling bertentangan.

"Menimbang beberapa hal yang sudah kami sampaikan di atas, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menyatakan menyetujui 10 (Sepuluh) Rancangan Undang-Undang Tentang Kabupaten/Kota Pada Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Sulawesi Utara untuk dilanjutkan prosesnya ke tahap berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fraksi PKS akan terus berkontribusi aktif dengan memberikan masukan-masukan yang konstruktif, yang akan disampaikan dalam pembahasan berikutnya," tutup Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat V ini.

> 10 RUU ini perlu disusun agar dasar hukum dari 10 Kabupaten/Kota menyesuaikan dengan konsep otonomi daerah dan perkembangan ketatanegaraan di Indonesia yang sejalan dengan UUD NRI Tahun 1945 dalam kerangka NKRI,"
>
> **drh. H. ACHMAD RU'YAT, M.Si.**
> Anggota Badan Legislasi DPR RI

image istimewa

Banjir Semakin Tak Terkendali, Baleg FPKS Kholid : Urgensi Indonesia Butuh RUU Keadilan Iklim

Jakarta (06/03) --- Banjir dan bencana alam lainnya yang semakin sering terjadi dan tak terkendali di berbagai wilayah di Indonesia menunjukkan betapa gentingnya krisis iklim yang sedang masyarakat hadapi.

Curah hujan ekstrem, naiknya permukaan air laut, serta kerusakan lingkungan di darat dan perairan memperparah situ-asi, mengancam keselamatan warga dan menimbulkan kerugian ekonomi.

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Muhammad Kholid, menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Keadilan Iklim adalah kebutuhan mendesak.

“Dalam menghadapi bencana alam yang disebabkan oleh krisis iklim ini, sudah saatnya Indonesia memiliki payung huk-um yang jelas dan kuat terkait keadilan iklim,” tegas Kholid.

Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa sejak awal tahun hingga 3 Maret 2025, telah terjadi 526 peristiwa bencana alam di Indonesia, di mana 342 di antaranya adalah banjir.

Beberapa hari belakangan, daerah yang paling terdampak banjir adalah Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang, dan daerah lainnya di Jawa Barat. Kejadian ini tidak hanya menyebabkan kerugian materiil yang signifikan tetapi juga menelan korban jiwa dan memaksa ribuan orang kehilangan tempat tinggal.

“Rentetan bencana ini menunjukkan bahwa perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan, tapi dampaknya sudah nyata di hadapan kita,” ujar Kholid yang merupakan Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu.

Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat VI Kota Depok Kota Bekasi itu memandang bahwa RUU Keadilan Iklim tidak hanya mengatur mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, tetapi juga memastikan adanya perlindungan bagi masyarakat terdampak, khususnya kelompok rentan.

“Keadilan iklim berarti mereka yang paling sedikit berkontribusi terhadap krisis ini tidak boleh menjadi korban terbesar, dan tanggung jawab utama harus dipikul oleh para pelaku emisi besar dan industri yang lalai terhadap kelestarian lingkungan,” sambung Kholid.

Selain itu, RUU ini juga

BERIKUTNYA »»

Banjir Semakin Tak Terkendali, Baleg FPKS Kholid : Urgensi Indonesia Butuh RUU Keadilan Iklim

SEBELUMNYA

harus mencakup tata ruang dan tata wilayah yang berkeadilan dan tidak memarjinalkan ekosistem lingkungan, guna memastikan bahwa pengelolaan ruang dan wilayah dapat berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat secara adil.

Pengesahan RUU Keadilan Iklim juga akan mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta dunia usaha dalam menjalankan kebijakan ekonomi hijau. Tanpa regulasi yang tegas, upaya mengurangi emisi karbon dan mengelola risiko bencana hanya akan menjadi janji kosong.

"RUU ini perlu menjadi landasan hukum agar semua pihak, termasuk masyarakat sipil, memiliki peran aktif dalam pengawasan kebijakan iklim," ujar Kholid yang merupakan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia itu.

Sebagaimana diketahui, DPR RI sudah memasukkan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 dan akan segera masuk tahap berikutnya.

Kolaborasi lintas sektor-pemerintah, parlemen, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta—sangat penting untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan bersifat adil dan inklusif.

"Kita di DPR RI akan segera menindaklanjuti, karena sudah masuk Prolegnas Prioritas tahun ini," tutup Kholid.

image istimewa

"Keadilan iklim berarti mereka yang paling sedikit berkontribusi terhadap krisis ini tidak boleh menjadi korban terbesar, dan tanggung jawab utama harus dipikul oleh para pelaku emisi besar dan industri yang lalai terhadap kelestarian lingkungan,"

H. MUHAMMAD KHOLID, S.E., M.Si.
Anggota Komisi XI DPR RI

Follow
Akun tiktok
Fraksi PKS DPR RI
@fraksipksdprri
PKS
fraksi.pks.id
FPKS DPR RI
fraksipksdprri
@FPKSDPRRI
PKS TV DPR RI

image istimewa

Sosialisasi Empat Pilar, Ateng Sutisna Ajak Warga Implementasikan Nilai Kebangsaan dalam Kehidupan

Kabupaten Subang (03/03) –- Tidak kurang dari 150 orang perwakilan warga dusun Cipedes, Desa Pasirmuncang, dusun Babakan Pabuaran, dusun Krajan Utara, Krajan Tengah, Krajan Selatan, Desa Sindangsari, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang, Jawa Barat, secara antusias mengikuti Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, yang dilaksanakan Anggota DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna.

Para warga yang umumnya terdiri dari petani, tokoh masyarakat, pemuda tani, dan ulama mendapatkan pencerahan terkait Empat Pilar Kebangsaan yang disampaikan di Aula Yayasan Ali bin Abi Tholib, Desa Sindangsari, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang, pada Jumat (28/02/2025).

Ateng Sutisna menjelaskan pentingnya Empat Pilar Kebangsaan yang bertujuan untuk menggali nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar dapat difahami masyarakat sebagai landasan utama dalam membentuk identitas dan karakter bangsa Indonesia.

“Seperti yang kita ketahui bersama, Empat Pilar MPR RI terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat pilar ini adalah landasan utama yang membentuk identitas dan karakter bangsa Indonesia,” Kata Ateng Sutisna.

Empat pilar kebangsaan tersebut kata Ateng meliputi, Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

“Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, pandangan hidup, serta pemersatu bangsa. Pancasila menjadi dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara dan seluruh warga negara Indonesia. Dengan memahami dan menerapkan sila-sila Pancasila, kita dapat menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadilan sosial,” tandasnya.

Kedua, UUD 1945 sebagai konstitusi negara serta

BERIKUTNYA »»

Sosialisasi Empat Pilar, Ateng Sutisna Ajak Warga Implementasikan Nilai Kebangsaan dalam Kehidupan

« SEBELUMNYA

Ketetapan MPR merupakan konstitusi negara yang mengatur tata kehidupan bernegara dan menjamin hak serta kewajiban setiap warga negara.

"Penting bagi kita untuk memahami dan menghormati UUD 1945 agar tercipta kehidupan yang demokratis dan berkeadilan," urainya.

Ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI sebagai bentuk negara dan harga mati persatuan bangsa adalah wujud nyata dari persa-tuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam menjaga keutuhan NKRI.

"Kita harus selalu waspada terhadap segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah bangsa. Kesatuan ini harus dijaga dengan penuh tanggung jawab oleh setiap warga negara," sambungnya.

Keempat, lanjut Ateng, yaitu Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara yang menggambarkan semangat keberagaman sebagai modal sosial membangun kekuatan bangsa.

"Prinsip ini mengajarkan kita untuk menghormati dan merayakan keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa yang ada di Indonesia. Dengan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, kita dapat membangun masyarakat yang harmonis dan toleran," tegasnya.

Ateng mengajak, seluruh komponen warga peserta sosialisasi untuk memahami 4 pilar kebangsaan dalam kehidupan sehari- sehari dan menjadikan landasan, begitupun dalam mengambil keputusan sehingga kemajuan dan kesejahteraan bangsa bisa terwujud.

"Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama memperkuat pemahaman dan pengamalan 4 Pilar Kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jadikan nilai-nilai yang terkandung dalam 4 Pilar ini sebagai landasan dalam setiap tindakan dan keputusan yang kita ambil demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa," pungkasnya.

Sosialisasi ini diikuti juga dengan pemberian door prize bagi para peserta yang mampu menjawab pertanyaan seputar Empat Pilar Kebangsaan yang diajukan secara spontan oleh Ateng Sutisna.

image istimewa

> "Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama memperkuat pemahaman dan pengamalan 4 Pilar Kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jadikan nilai-nilai yang terkandung dalam 4 Pilar ini sebagai landasan dalam setiap tindakan dan keputusan yang kita ambil demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,"

Ir. H. ATENG SUTISNA
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat IX

image istimewa

Berikan Bantuan Banjir di Bekasi dan Karawang, Haji Jalal Harap Bisa Ringankan Beban Korban Banjir

Bekasi (07/03) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Jalal Abdul Nasir, berkolaborasi dengan YBM PLN UP3 Karawang dan PHE dalam menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang.

Haji Jalal bersama tim segera bergerak menyalurkan bantuan ke lokasi-lokasi terdampak, khususnya di Kecamatan Teluk Jambe Barat dan Teluk Jambe Timur, yang mencakup Desa Mulya Jaya, Karangligar, Parung Sari, Mekar Mulya, Sukamakmur, Purwadana, dan Wanakerta.

"Kami berupaya hadir di tengah masyarakat yang sedang mengalami kesulitan akibat banjir. Berkat sinergi dengan YBM PLN UP3 Karawang dan PT PHE, kami dapat menyalurkan bantuan yang diharapkan dapat sedikit meringankan beban saudara-saudara kita di Bekasi dan Karawang," ujar Haji Jalal.

Haji Jalal berharap bantuan ini tidak hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek, tetapi juga menjadi pengingat akan pentingnya gotong royong dalam menghadapi bencana.

"Semoga ke depan kita semakin siap dalam menghadapi bencana dengan mitigasi yang lebih baik, serta memperkuat kebersamaan untuk membangun daerah yang lebih tangguh," ujarnya.

Sementara itu, tim relawan bersama YBM PLN UP3 Karawang dan PHE langsung mendistribusikan bantuan yang mencakup 750 paket nasi untuk berbuka puasa, 9 dus popok dan pembalut, 44 dus air mineral, 5 pack biskuit/ makanan balita, serta alat-alat kebersihan seperti sapu, pel, dan sikat.

Masyarakat menyambut bantuan ini dengan penuh haru dan mengungkapkan rasa terima kasih atas kepedulian dari berbagai pihak yang telah membantu mereka di tengah situasi sulit.

Perwakilan dari YBM PLN UP3 Karawang dan PHE juga menyampaikan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam membantu masyarakat yang terkena dampak bencana.

"Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, kami siap bersinergi dalam upaya tanggap darurat dan pemulihan pasca-banjir," ujar salah satu perwakilan dari YBM PLN UP3 Karawang.

Tim relawan bersama YBM PLN UP3 Karawang dan PHE

BERIKUTNYA »»

Berikan Bantuan Banjir di Bekasi dan Karawang, Haji Jalal Harap Bisa Ringankan Beban Korban Banjir

« SEBELUMNYA

langsung mendistribusikan bantuan yang mencakup 750 paket nasi untuk berbuka puasa, 9 dus popok dan pembalut, 44 dus air mineral, 5 pack biskuit/makanan balita, serta alat-alat kebersihan seperti sapu, pel, dan sikat.

Masyarakat menyambut bantuan ini dengan penuh haru dan mengungkapkan rasa terima kasih atas kepedulian dari berbagai pihak yang telah membantu mereka di tengah situasi sulit.

Perwakilan dari YBM PLN UP3 Karawang dan PHE juga menyampaikan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam membantu masyarakat yang terkena dampak bencana.

"Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, kami siap bersinergi dalam upaya tanggap darurat dan pemulihan pasca-banjir," ujar salah satu perwakilan dari YBM PLN UP3 Karawang.

Bantuan ini diharapkan dapat memberikan kelegaan bagi warga yang terdampak, serta menginspirasi lebih banyak pihak untuk ikut berkontribusi dalam aksi kemanusiaan.

Bantuan yang diberikan mencakup makanan siap saji, paket sembako, popok, pembalut, air mineral, makanan balita, serta alat-alat kebersihan, sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang terdampak musibah.

Hujan deras yang mengguyur wilayah Bekasi dan Karawang dalam beberapa hari terakhir menyebabkan banjir di sejumlah titik, merendam permukiman warga, serta menghambat aktivitas sehari-hari.

Bersama, kita bangkit dan kuat menghadapi segala cobaan!

image istimewa

"Kami berupaya hadir di tengah masyarakat yang sedang mengalami kesulitan akibat banjir. Berkat sinergi dengan YBM PLN UP3 Karawang dan PT PHE, kami dapat menyalurkan bantuan yang diharapkan dapat sedikit meringankan beban saudara-saudara kita di Bekasi dan Karawang,"

H. JALAL ABDUL NASIR, Ak.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VII

Kunjungan ke Dapil, Ledia Ditanya Soal Efisiensi di Ranah Pendidikan

Bandung (04/03) --- Ada yang berbeda saat anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa melakukan kunjungan ke dapilnya di Kota Bandung dan Kota Cimahi pada akhir Februari lalu.

Dari lebih dari 12 titik kegiatan kunjungan kali ini selalu muncul pertanyaan serupa terkait program efisiensi yang dicanangkan Presiden Prabowo utamanya di ranah pendidikan.

“Jadi kunjungan-kunjungan ke dapil kali ini, hampir di semua titik pertemuan, selalu muncul pertanyaan terkait efisiensi, apakah kena ke ranah pendidikan dan lalu bagaimana nasib program PIP dan KIP Kuliah, apakah akan terdampak. Merata pertanyaannya,” kata Ledia

Menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut Ledia menjelaskan bahwa program efisiensi yang digulirkan Pemerintahan Prabowo memiliki landasan hukum yaitu pada Inpres No. 1 Tahun 2025 yang dikenakan kepada seluruh Kementerian/Lembaga.

"Ini berarti termasuk kepada kementerian yang menaungi bidang pendidikan seperti Kemendikdasmen dan Kemediktisaintek," ungkapnya.

Meski demikian, merujuk pada instruksi ketiga pada Inpres No. 1 Tahun 2025 tersebut, belanja pegawai dan belanja sosial merupakan hal yang dikecualikan dari rencana efisiensi anggaran APBN 2025.

"Gejolak memang sempat terjadi, apalagi saat Menteri Diktisaintek yang lama menyampaikan kalau ada kemungkinan penerima KIP Kuliah dan beberapa jenis bantuan beasiswa lain yang sudah berjalan bisa tidak dilanjutkan," ujarnya.

Hal ini, imbuh Ledia, segera memunculkan reaksi dari mahasiswa, juga memunculkan reaksi dari anggota Komisi X DPR RI.

“Inpresnya jelas-jelas menyebutkan bahwa belanja sosial tidak boleh dipotong. Kami di Komisi X memperjuangkan hal ini dengan sangat tegas. Untuk dana PIP relatif lebih mudah karena dia sumber keuangannya di Bendahara Umum Negara. Yang agak berat itu KIP Kuliah karena dia melekat di Kementerian, yang jelas-jelas anggarannya memang dipotong efisiensi. Maka kami ingatkan betul, tidak boleh ada pengurangan, tidak boleh ada pemberhentian bantuan-bantuan yang sudah berjalan. Efisiensi itu bisa dilakukan pada pos-pos belanja lain seperti belanja kantor, perjalanan dinas, kegiatan seremoni dan sejenisnya. Dan dengan Mendiktisaintek baru sudah _clear_, Alhamdulillah,” lanjut Sekretaris Fraksi PKS ini memberikan kabar gembira.

Tak hanya itu, aleg dapil Kota bandung Kota Cimahi ini juga menuturkan bahwa dalam beberapa rapat bersama Mendikdasmen dan Mendiktisaintek dirinya juga menyampaikan dorongan untuk memastikan hak-hak ASN, non-ASN, guru, tendik juga dosen yang dilindungi oleh undang-undang, harus bisa dipenuhi.

“Dalam beberapa rapat saya sampaikan, hak-hak ASN, non-ASN, guru, tendik juga dosen yang dilindungi oleh undang-undang itu harus bisa dipenuhi. Aapa saja contohnya? yang terkait dengan sertifikasi, terkait dengan tunjangan, itu kan dilindungi oleh undang dan itu harus dipastikan bisa terpenuhi. Sehingga ke depannya, kita harap dalam waktu yang tidak lama persoalan terkait sertifikasi, tunjangan-tunjangan, tidak ada lagi yang terhambat, termasuk tunjangan profesi guru di daerah itu bisa dikelola oleh pemerintah pusat lalu dilakukan _direct transfer_ dari pusat ke daerah.” Tutup Ledia

> Kita harap dalam waktu yang tidak lama persoalan terkait sertifikasi, tunjangan-tunjangan, tidak ada lagi yang terhambat, termasuk tunjangan profesi guru di daerah itu bisa dikelola oleh pemerintah pusat lalu dilakukan _direct transfer_ dari pusat ke daerah.”

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Anggota Komisi X DPR RI

Sosialisasi Empat Pilar Bulan Ramadan Meity Rahmatia Ajak Perbanyak Silahturahmi untuk Kesatuan Bangsa

Makassar (07/03) --- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia dari Fraksi PKS, Meity Rahmatia kembali menggelar sosialisasi empat pilar di Makassar. Berbeda dengan sebelumnya, kegiatannya kali ini, diadakan di bulan suci Ramadhan 1446 H.

Bertempat di Hotel Claro Makassar, Kamis(6/3/2025), Anggota Komisi XIII itu mengundang konstituennya dari Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Sejumlah tokoh masyarakat juga turut hadir.

Seperti biasa, sosialisasi empat pilar diawali dengan penjelasan tentang Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Setelah itu dilanjut diskusi dengan peserta maupun tokoh masyarakat.

Salah satu poin yang disampaikan Meity pada sosialisasi ini adalah pentingnya menjadikan bulan suci Ramadhan sebagai momentum untuk mempererat silaturahmi antar anak bangsa.

"Dengan demikian kesatuan kita sebagai rakyat Indonesia semakin kuat. Jika kita bersatu maka ketahanan nasional akan semakin kuat pula," jelasnya.

Sosialisasi empat pilar yang berlangsung selama beberapa jam ini disambut hangat peserta.

Mereka antusias memberikan tanggapan dan pertanyaan di sesi diskusi. Diantaranya adalah Haji Bohari, perwakilan dari tokoh masyarakat dari Gowa, Sulsel. Ia mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh politisi partai keadilan sejahtera tersebut.

Ia berharap, Meity sebagai anggota DPR RI meningkatkan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pendidikan budaya dan politik.

"Saya sangat berharap bu dewan bisa lebih rutin lagi ke masyarakat untuk memahamkan cinta tanah air dan semangat persatuan ke masyarakat. Ya, kita tahu bahwa di tengah perkembangan teknologi ini, anak-anak kita semakin banyak juga terpengaruh dengan budaya luar. Misalnya, lebih suka yang berbau-bau korea, hehehe" ungkapnya sambil bercanda.

Pada beberapa waktu ke depan, sosialisasi empat pilar rencana akan kembali digelar oleh politisi bernama lengkap, Meity Rahmatia, namun di lokasi yang berbeda.

> "Saya sangat berharap bu dewan bisa lebih rutin lagi ke masyarakat untuk memahamkan cinta tanah air dan semangat persatuan ke masyarakat. Ya, kita tahu bahwa di tengah perkembangan teknologi ini, anak-anak kita semakin banyak juga terpengaruh dengan budaya luar. Misalnya, lebih suka yang berbau-bau korea, hehehe"
>
> **Hj. MEITY RAHMATIA, S.Pd., S.E., M.M.**
> Anggota Fraksi PKS DPR RI Sulawesi Selatan I

image istimewa

Mahfudz Abdurrahman Berharap Bantuan Banjir ke Sekolah Dapat Selesaikan Persoalan

Bekasi (06/03) --- Banyaknya titik banjir yang berdampak ke sekolah di Kota Bekasi menjadikan perhatian tersendiri bagi Pemerintah Pusat.

Hari ini Kamis (6/3/2025) tinjauan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) ke sejumlah sekolah.

Tampak hadir pula dalam kesempatan tersebut yakni Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Mahfudz Abdurrahman.

Ia mengaku mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Kemendikdasmen tersebut.

"Alhamdulillah, saya bisa mendampingi Mendikdasmen yang menunjukkan kepedulianya terhadap persoalan-persoalan yang diderita oleh masyarakat, khususnya dunia pendidikan," kata Mahfudz kepada awak media.

Anggota DPR RI dua periode ini menyaksikan pemberian bantuan Kemendikdasmen yang diberikan langsung oleh Abdul Mu'ti kepada Kepala SDN Pekayonjaya IV MA Muhammadiyah 3 Kota Bekasi.

"Tadi juga bantuan sudah diberikan dalam bentuk uang maupun Natura atau barang, saya sebagai mitra Kemendikdasmen. Memberi apresiasi dan support, serta memberikan dukungan terhadap apa yang sudah diberikan oleh Abdul Muti," lanjutnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun berharap bantuan yang telah diberikan oleh Kemendikdasmen dapan membantu serta meringankan persoalan yang dihadapi.

"Mudah-mudahan semua ini bisa meringankan derita yang dialami, dan juga diharapkan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi," harap Mahfudz.

> "Tadi juga bantuan sudah diberikan dalam bentuk uang maupun Natura atau barang, saya sebagai mitra Kemendikdasmen. Memberi apresiasi dan support, serta memberikan dukungan terhadap apa yang sudah diberikan oleh Abdul Muti,
>
> **H. MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos**
> Wakil Ketua Komisi X DPR RI

image istimewa

Berbagi Ribuan Ta'jil Bergizi Gratis di Dapil, Nevi Zuairina Ajak Kuatkan Silaturahmi dan Kebersamaan

Padang Pariaman (10/03) --- Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Nevi Zuairina, kembali menunjukkan kepedulian dengan berbagi ribuan takjil yang disebar secara serentak di berbagai titik di daerah pemilihannya, Sumatera Barat II.

Pembagian takjil ini bertujuan untuk memperkuat silaturahmi dengan masyarakat sekaligus membantu umat Islam yang tengah menjalankan ibadah puasa agar dapat segera berbuka tepat waktu.

Salah satu lokasi utama pembagian adalah di depan kantor DPD PKS Kota Pariaman, dimana Nevi Zuairina hadir langsung menyapa warga dan turut membagikan takjil secara langsung.

"Alhamdulillah, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kami dapat terus berbagi dan dekat dengan masyarakat. Kegiatan ini merupakan wujud kebersamaan sekaligus bentuk kepedulian PKS kepada umat Islam khususnya di daerah Sumbar II," ujar Nevi Zuairina disela-sela kegiatan tersebut.

Daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Barat II yang diwakili Hj. Nevi Zuairina mencakup Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Bukittinggi, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Kota Payakumbuh. Secara serentak, kegiatan berbagi takjil ini digelar di berbagai lokasi strategis di masing-masing wilayah tersebut.

Selain berbagi takjil, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk mendengarkan aspirasi langsung dari masyarakat terkait kondisi terkini di daerah masing-masing.

Menurut politisi PKS ini, kegiatan berbagi ta'jil sangat penting sebagai sarana menjalin komunikasi dan memperkuat hubungan emosional dengan masyarakat.

Masyarakat pun menyambut antusias kegiatan ini. Banyak warga yang merasa terbantu dengan pembagian takjil, terutama mereka yang tengah dalam perjalanan atau masih beraktivitas menjelang berbuka puasa.

"Kami sangat bersyukur atas kegiatan ini. Terima kasih kepada ibu Nevi dan PKS yang sudah peduli kepada kami," ungkap salah satu warga yang ikut antri menerima takjil di Kota Pariaman.

Nevi berharap, kegiatan ini tidak hanya sebatas membagikan makanan dan minuman, tetapi juga menjadi ajang mempererat tali silaturahmi serta semangat kebersamaan di bulan Ramadan yang penuh berkah.

> Kegiatan ini merupakan wujud kebersamaan sekaligus bentuk kepedulian PKS kepada umat Islam khususnya di daerah Sumbar II,"
>
> **Hj. NEVI ZUAIRINA**
> Anggota Fraksi PKS DPR RI
> Dapil Sumatera Barat II

Gelar Kundapil, Anggota DPR RI Alqassam Kasuba Sempatkan Diri Turun Ke jalan Berbagi Takjil

Maluku Utara (08/03) --- Anggota DPR RI Dapil Maluku Utara (Malut), Izzuddin Alqassam Kasuba menyempatkan diri mengisi Jadwal kunjungan Dapil (Kundapil), dengan turun langsung ke jalan dalam aksi berbagi takjil buka puasa.

Kegiatan pembagian Takjil Bergizi ini, berlangsung di Kelurahan Salero Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Maluku Utara, Jum'at (7/3/2025) sore.

Sebanyak 150 paket takjil bergizi dibagikan kepada masyarakat. Ratusan takjil tersebut dibagikan kepada masyarakat pengguna roda dua, roda empat dan setiap warga yang ditemui saat kegiatan pembagian berlangsung.

Pantauan Media ini, Tampak warga sangat Senang menerima langsung takjil dari tangan politisi Muda PKS itu.

" Alhamdulillah ala kulli haal, kundapil kali ini kita bisa turun langsung ke jalan melakukan kegiatan sosial dengan membagikan ratusan paket Takjil kepada masyarakat, " tukas Alqassam Kasuba.

Dalam kesempatan ini, Qassam sapaan akrabnya itu, menyampaikan bahwa bulan Ramadhan adalah momen berbagi dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama.

Bulan Ramadhan kata dia, merupakan bulan penuh berkah. Sebagai bentuk rasa syukur, pihaknya membagikan takjil kepada masyarakat yang sedang dalam perjalanan untuk berbuka puasa.

" Mari sama-sama kita manfaatkan bulan suci ini dengan meningkatkan kualitas ibadah dan memperbanyak amal saleh dengan berbagi terhadap sesama, " ajaknya.

" Allah menganjurkan kita untuk berbagai sebagaimana dalam firman-nya,

"Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat-gandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui," paparnya lagi menambahkan.

Diketahui, selama bulan Ramadhan ini Izzuddin Alqassam Kasuba bersama tim secara reguler mengadakan kegiatan reses atau kunjungan dapil dengan menggelar berbagai kegiatan dan kunjungan sebagaimana yang telah diagendakan.

> Bulan Ramadhan merupakan bulan penuh berkah. Sebagai bentuk rasa syukur, pihaknya membagikan takjil kepada masyarakat yang sedang dalam perjalanan untuk berbuka puasa. Mari sama-sama kita manfaatkan bulan suci ini dengan meningkatkan kualitas ibadah dan memperbanyak amal saleh dengan berbagi terhadap sesama, "
>
> **IZZUDDIN ALQASSAM KASUBA**
> Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Maluku Utara

image istimewa

Aleg PKS Kurniasih Turun ke Dapil Berbagi Sahur Bergizi Gratis bagi Korban Banjir Jakarta

Jakarta (11/03) --- Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati turun ke wilayah terdampak banjir di wilayah Pondok Pinang, Jakarta Selatan.

Kurniasih menyebutkan curah hujan yang tinggi selama beberapa hari terakhir menimbulkan banjir besar di wilayah Jakarta, Bekasi, Depok hingga Bogor.

Kurniasih berharap warga masyarakat tetap bisa bersabar dengan musibah ini terlebih juga terjadi pada bulan Ramadhan. Warga yang terpaksa meninggalkan sementara rumah karena banjir pasti kesulitan dalam memenuhi kebutuhan buka dan sahur.

"Alhamdulillah saya bisa silaturahim dengan warga di RT 09 RW 04 di wilayah Pondok Pinang Jakarta Selatan pada saat sahur. Banjir masih menggenang setinggi mata kaki, jadi warga masih cukup waspada," ungkap Kurniasih.

PKS, ujar dia, pada Ramadhan tahun ini juga menggelar program berbagi Sahur Bergizi kepada masyarakat.

"Qadarullah wilayah kita di Jakarta Selatan ini juga terdampak banjir, kita kirimkan bantuan sahur untuk masyarakat semoga bisa sedikit membantu memenuhi kebutuhan sahur," sebut Anggota Komisi IX DPR RI ini.

Kurniasih berharap banjir segera surut agar tidak ada dampak ikutan lainnya akibat banjir yang terjadi. Dikhawatirkan, jika banjir berlangsung beberapa hari, dampak ikutan dari segi kesehatan akan terjadi.

"Semoga segera cepat surut dan masyarakat bisa beraktivitas Ramadhan tanpa halangan, bisa memaksimalkan waktu dengan ibadah tanpa harus terdampak banjir," urainya.

Selain di wilayah Pondok Pinang, Tim Relawan Kurniasih juga mengirim bantuan ke beberapa wilayah di Jakarta Selatan yang terdampak banjir seperti di Pasar Minggu dan Jagakarsa.

> "Alhamdulillah saya bisa silaturahim dengan warga di RT 09 RW 04 di wilayah Pondok Pinang Jakarta Selatan pada saat sahur. Banjir masih menggenang setinggi mata kaki, jadi warga masih cukup waspada,"
>
> **Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.**
> Anggota Komisi IX DPR RI

Tinjau Lokasi Banjir di Palas Rumbai,

Hendry Munief Bawa Tenaga Medis dan Bantuan untuk Warga

Pekanbaru (10/03) --- Banjir yang melanda wikayaj Rumbai Kota Pekanbaru membuat ratusan ribu warga meninggalkan rumah dan tinggal di posko pengungsian. Hal ini mendorong keprihatinan banyak pihak.

Anggota DPR RI Fraksi PKS, H. Hendry Munief, MBA berkesempatan turun langsung meninjau kondisi warga di lokasi banjir, tepatnya di Kelurahan Palas RW 01 Jumat (7/4/2025). Ada 167 KK terdampak di wilayah ini.

Di posko banjir, Hendry Munief melihat banjir ini membawa dampak besar bagi warga, baik dalam hal konomi/pekerjaan, kesehatan, hingga terganggunya aktifitas sehari-hari.

"Kita tadi berbincang-bincang dengan warga, mereka mengeluhkan banjir membawa dampak negatif kepada mereka sekeluarga. Ini membuat kita prihatin, tapi memang bencana alam ini tidak bisa kita elakkan karena kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini." kata Hendry Munief.

Kedatangan Hendry Munief turut membawa tenaga medis sebanyak 8 orang dokter dan beberapa tenaga perawat beserta obat-obatan umum yang diperlukan.

"Kita juga bawa buah tangan untuk perbukaan. Kita memang tidak bisa membawa lebih karena ketika kita data titik banjir ternyata sangat banyak di Riau saat ini. Maka kita bagi-bagi sesuai porsi masing-masing." kata Hendry Munief yang juga Ketua Forbis Riau ini.

Pada kesempatan itu, Hendry Munief juga bertemu dengan warga yang baru melahirkan. Hendry Munief diberi kehormatan memberi nama bayi itu.

"Kita beri nama Sabrina Ramadhani yang artinya kesabaran kami pada bulan Ramadhan. Semoga ananda dapat mengingat bagaimana perjuangan orang tuanya, dan insyaa Allah nanti kalau diundang, kita akan hadir saat syukuran pemberian nama." tutupnya.

Seorang tokoh RW 01 Kecamatan Palas, Murdianto, menyampaikan terima kasih kepada Ustadz Hendry Munief yang sudah memperhatikan wilayah mereka dengan menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis dan bantuan makanan untuk warga yang terdampak.

"Terimakasih bapak ustadz yang sudah memperhatikan warga kami. Di sini rata-rata nelayan, buruh dan sebagainya. Ketika terjadi banjir mereka banyak yang tidak bisa bekerja dan tidak bisa menempati rumah. Kedatangan ini membawa makanan dan terpenting ada pemeriksaan kesehatan. Warga dapat berkonsultasi langsung terkait kesehatannya," terang Murdianto.

Sementara itu Ketua RW 01 Kelurahan Palas, Megawati, menerangkan bahwa warganya merasa terbantu dengan kehadiran Hendry Munief dalam rangka pemeriksaan kesehatan gratis. Megawati melihat antusias warganya sangat tinggi.

"Kita ucapkan terima kasih kepada bapak ustadz karena sudah memilih RW kami untuk melaksanakan bakti sosial. Warga kita diberi bantuan makanan dan juga pemeriksaan kesehatan gratis beserta obat-obatan. Warga kita nampaknya juga menyempatkan untuk berkonsultasi terkait penyakit lainnya selain akibat banjir ini." tuturnya.

> “Kita tadi berbincang-bincang dengan warga, mereka mengeluhkan banjir membawa dampak negatif kepada mereka sekeluarga. Ini membuat kita prihatin, tapi memang bencana alam ini tidak bisa kita elakkan karena kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini."
>
> **H. HENDRY MUNIEF, M.B.A.**
> Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Riau I

image istimewa

Aleg PKS Riyono 'Caping': Uji Ukur Minyak Kita di Magetan Takaran 1 Liter Harga di atas HET

Magetan (09/03) --- Kunjungan dapil yang dilakukan oleh Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Riyono 'Caping' memastikan bahwa takarannya sesuai dengan kemasan yang ada di pasar Tradisional Gorang - Gareng Kawedanan Magetan Jatim.

“Saya lakukan pengecekan harga sembako sudah 2 hari ini di Magetan terhadap beberapa harga bahan pokok strategis kebutuhan rakyat, mulai beras, gula, minyak kita, bawang putih, bawang merah, telur dan juga tepung terigu” papar Riyono 'Caping'.

Melihat suasana pasar tradisional Riyono dapatkan kondisi ketersedian stok relatif masih cukup dan juga harga juga masih aman terkendali walaupun memang mulai merangkak naik khususnya bawang putih dan bawang merah.

“Temuan penting lain adalah ketersedian minyak kita yang sulit didapatkan per hari ini, keterangan pedang grosir dan pedagang kecil sudah sepekan ini minyak kita belum ada stok lagi” tambah Riyono.

Dalam kunjungan ini Riyono juga melakulan uji ukur terhadap volume dan takaran minyak kita kemasan 1 liter secara langsung dengan membeli di pedagang kecil disaksikan oleh Anggota DPRD Magetan dan juga 8 awak media lokal di Magetan dan Ponorogo.

“Hasil uji ukur takaran minyak kita di Pasar Gorang - Gareng Kawedanan membuktikan bahwa volumenya persis 1 liter dan kualitasnya juga baik, kalau yg di cek sama pak Mentri Pertanian kurang dari 1 liter maka perlu sanksi tegas kepada perusahaanya,” tambah Riyono.

Temuan lain dalam sidak ini adalah harga minyak kita memang di cek ke grosir dan pedagang kecil sudah di atas HET semua, jika HET 15.700 di jual sama pedagang kecil 16.000 sampai 16.600.

“Kondisi pasar kecil yang jauh dari pengawasan dan juga kebutuhan yang tinggi membuat minyak kita harganya terus naik walaupun takaran tepat” tutup Riyono.

> “Saya lakukan pengecekan harga sembako sudah 2 hari ini di Magetan terhadap beberapa harga bahan pokok strategis kebutuhan rakyat, mulai beras, gula, minyak kita, bawang putih, bawang merah, telur dan juga tepung terigu”
>
> **RIYONO, S.Kel., M.Si.**
> Anggota Komisi IV DPR RI

Catat Yuk!
Jadwal Libur Sekolah di Ramadan 2025

Pemerintah Terbitkan Surat Edaran Bersama untuk Pembelajaran Semasa Ramadan

PKS TV DPR RI | FPKS DPR RI | fraksipksdprri | @fpksdprri | @fraksipksdprri

Momen ramadan bisa menjadi kesempatan emas untuk memperkuat karakter siswa melalui kegiatan yang terarah di sekolah. Lomba keagamaan, diskusi nilai-nilai Ramadan, atau kajian keislaman dapat menjadi bagian dari kurikulum yang memperkuat iman sekaligus menjaga semangat belajar.

Habib Idrus Salim Aljufri, Lc., M.B.A
Anggota DPR RI

PKS TV DPR RI | FPKS DPR RI | fraksipksdprri | @fpksdprri | @fraksipksdprri

DPR RI I Grafis: Heri

Tanggal Libur

27 Februari
s/d
5 Maret
Kegiatan belajar mandiri dilingkungan keluarga, tempat ibadah, atau masyarakat

26 Maret
s/d
8 April
Libur Idulfitri

*Aturan diteken Mendikdasmen, Menag, dan Mendagri

PKS TV DPR RI | FPKS DPR RI | fraksipksdprri | @fpksdprri | @fraksipksdprri

Sumber: itjen.kemdikbud.go.id I Grafis: Heri

Terima Aspirasi Serikat Pengemudi Daring, Reni Astuti Perjuangkan Legalitas dan Kesejahteraan

Jakarta (11/03) --- Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Reni Astuti, menerima audiensi dari Serikat Pengemudi Daring (Speed) yang menyampaikan aspirasi terkait legalitas dan kesejahteraan pengemudi ojek online

di Ruang Rapat Pleno Fraksi PKS, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (11/3). Turut hadir dalam pertemuan ini Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, M. Kholid.

Dalam audiensi ini, Ketua Harian Nasional Speed, Suharyanto, menyampaikan keresahan para pengemudi daring terhadap status kemitraan mereka dengan aplikator yang dinilai tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas.

"Kami disebut mitra, tapi dalam praktiknya tidak dianggap sebagai mitra yang sejati. Keputusan diambil tanpa melibatkan kami, padahal yang terdampak langsung adalah kami sebagai pengemudi," ungkapnya.

Suharyanto juga menyoroti kebijakan layanan baru seperti double order yang dinilai merugikan pengemudi.

"Seharusnya argo yang diperoleh dua kali lipat, tetapi dalam praktiknya kami hanya mendapatkan 1,2–1,5 kali tarif order. Lebih parah lagi, layanan ini tidak bisa ditolak," jelasnya.

Selain itu, permasalahan terkait jaminan sosial dan ketenagakerjaan juga menjadi perhatian. Menurut perwakilan Speed, aplikator hanya memfasilitasi pembayaran jaminan sosial tanpa memberikan subsidi atau dukungan finansial bagi pengemudi.

Menanggapi aspirasi tersebut, Reni Astuti menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan kepastian hukum bagi pengemudi daring.

"Saat ini, Komisi V DPR RI tengah membahas revisi UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Kami ingin memastikan bahwa masa depan transportasi daring lebih tertata dan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik," ujarnya.

Ia juga meminta rekan-rekan pengemudi daring untuk mengumpulkan bukti empiris terkait dugaan pengenaan potongan lebih dari 20% oleh aplikator.

Anggota Komisi XI DPR RI, M. Kholid, juga menyoroti adanya gray area dalam regulasi ojek online.

"Status mereka yang disebut sebagai 'mitra' menjadikan hak-hak pekerja sulit diperjuangkan. Ada relasi kuasa yang timpang antara aplikator dan pengemudi," katanya.

Dalam sesi tanya jawab, para pengemudi daring juga menyampaikan harapan agar revisi UU LLAJ dapat segera diselesaikan serta menyoroti maraknya pinjaman online dan judi online yang kerap menjerat pengemudi dengan penghasilan rendah.

Salah satu perwakilan perempuan juga menyoroti kondisi perempuan pengemudi daring yang sering kali harus tetap bekerja meski sedang hamil atau memiliki bayi karena tidak adanya perlindungan hukum.

"Kami akan terus memperjuangkan kepastian hukum bagi pengemudi daring agar memiliki perlindungan yang lebih baik di masa depan," pungkasnya.

> "Saat ini, Komisi V DPR RI tengah membahas revisi UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Kami ingin memastikan bahwa masa depan transportasi daring lebih tertata dan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik,"
>
> **RENI ASTUTI, S.Si., M.PSDM.**
> Anggota Komisi V DPR RI

Terima Audiensi Muhammadiyah Lowokwaru Malang

Gamal : Bahas Akses Pendidikan untuk Anak Dhuafa

Jakarta (06/03) --- Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur V (Malang Raya), dr. Gamal Albinsaid, menerima audiensi dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Lowokwaru Malang di Ruang Rapat Pleno Fraksi PKS, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (06/03).

Pertemuan ini membahas berbagai persoalan pendidikan, terutama terkait akses bagi anak-anak dhuafa dan optimalisasi pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di sektor pendidikan.

Ketua Rombongan PCM Lowokwaru dari Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Muhson menyampaikan bahwa ada sekitar 1.800 anak dari keluarga dhuafa di Lowokwaru yang kesulitan mengakses pendidikan layak.

"Anak-anak ini tumbuh besar dengan rasa takut untuk bercita-cita, dan itu menjadi concern kami. Sayangnya, keterbatasan sumber daya manusia, materi, dan akses pada kebijakan publik membuat kami sulit memberikan solusi yang optimal," ujar Muhson.

Salah satu perwakilan dalam audiensi, menambahkan bahwa pendidikan adalah kunci untuk memutus rantai kemiskinan.

"Banyak keluarga miskin yang kesulitan mengakses pendidikan, sementara fasilitas pendidikan lebih mudah dijangkau oleh mereka yang berasal dari keluarga berpendidikan. Kami melihat ada harapan, contohnya anak seorang tukang jahit yang berhasil menjadi dokter hingga meraih gelar S2. Namun, upaya kami masih terbatas tanpa dukungan lebih besar," tuturnya.

Menanggapi hal ini, Gamal yang kini duduk di Komisi X DPR RI, menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif.

Ia menyoroti rendahnya tingkat literasi dan numerasi anak-anak Indonesia sebagai tantangan besar yang harus dituntaskan sejak dari lingkungan keluarga.

"Kesejahteraan guru juga menjadi prioritas perjuangan kami di Komisi X. Selain itu, saya ingin memastikan bahwa program-program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dhuafa," jelas Gamal.

Terkait kendala pencairan dana PIP di bank yang mengharuskan siswa membuka rekening secara individu, Gamal mengungkapkan rencana untuk mendorong sistem pencairan langsung ke sekolah.

"Kami ingin memastikan pihak bank bisa langsung datang ke sekolah agar pencairan lebih mudah dan tidak membebani siswa serta orang tua. Tantangan terbesar adalah mengedukasi masyarakat tentang kompleksitas proses pencairan ini," tegasnya.

Audiensi ini diakhiri dengan harapan bisa membuka jalan bagi akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak dhuafa di Lowokwaru dan sekitarnya.

> "Kami ingin memastikan pihak bank bisa langsung datang ke sekolah agar pencairan lebih mudah dan tidak membebani siswa serta orang tua. Tantangan terbesar adalah mengedukasi masyarakat tentang kompleksitas proses pencairan ini,
>
> **dr. GAMAL ALBINSAID**
> Anggota Fraksi PKS DPR RI Jawa Timur V

Terima Audiensi HIMPAUDI,

Gamal Dukung Pengakuan dan Kesejahteraan Guru PAUD Non Formal

Jakarta (06/03) --- Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, dr. Gamal Albinsaid, menerima audiensi dari Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI)

di Ruang Rapat Pleno Fraksi PKS, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (06/03).

Dalam pertemuan ini, HIMPAUDI menyampaikan berbagai isu strategis yang dihadapi para pendidik PAUD non formal, termasuk ketimpangan pengakuan profesi dan kesejahteraan mereka.

Ketua Umum HIMPAUDI, Betti Nuraini menegaskan bahwa hingga saat ini, guru PAUD non formal belum mendapatkan pengakuan sebagai guru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

"Mengapa UU Guru dan Dosen tidak mau mengakui kami sebagai guru? Padahal kami sudah melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujarnya.

Menurut data yang disampaikan HIMPAUDI, saat ini terdapat sekitar 400.000 anggota HIMPAUDI yang tersebar di 34 provinsi, mengelola berbagai layanan pendidikan seperti Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan Kelompok Bermain (KB).

Namun, mayoritas guru PAUD non formal masih menghadapi tantangan kesejahteraan dengan rerata gaji di bawah Rp250.000 per bulan. Hal ini diperburuk oleh minimnya perlindungan hukum serta terbatasnya akses terhadap program Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi guru PAUD non formal.

Menanggapi pemaparan tersebut, Gamal mengapresiasi dedikasi para pendidik PAUD non formal dalam mencerdaskan generasi bangsa.

"Kami sangat mengapresiasi keikhlasan dan dedikasi rekan-rekan dalam mendukung pendidikan di Indonesia. Namun, keikhlasan dan dedikasi bukan berarti berlawanan dengan kesejahteraan," kata Gamal yang juga merupakan Dewan Pakar HIMPAUDI.

Ia menambahkan bahwa saat ini lebih dari 70% guru honorer di Indonesia mendapatkan penghasilan di bawah Rp.2 juta per bulan, dengan sebagian diantaranya bahkan di bawah Rp500.000.

Sebagai langkah strategis, Gamal mendorong HIMPAUDI untuk membentuk tim khusus yang secara kontinu mengawal isu ini di DPR maupun kementerian terkait.

"Momentum ini sangat tepat, karena UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan Panja sudah mulai bekerja. Dengan jumlah anggota yang besar, HIMPAUDI memiliki bargaining power yang cukup signifikan untuk memengaruhi proses pengambilan kebijakan," jelasnya.

Gamal juga berjanji akan mengkomunikasikan aspirasi HIMPAUDI kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah serta pimpinan Komisi X DPR RI agar isu ini mendapat perhatian serius.

Gamal menutup pertemuan dengan mengajak semua pihak untuk bersabar dan terus berjuang dalam memperjuangkan hak-hak guru PAUD non formal.

"Tidak ada kebaikan yang sempurna tanpa kesabaran," ujarnya sebagai penutup pertemuan yang penuh semangat ini.

> "Kami sangat mengapresiasi keikhlasan dan dedikasi rekan-rekan dalam mendukung pendidikan di Indonesia. Namun, keikhlasan dan dedikasi bukan berarti berlawanan dengan kesejahteraan,"
>
> **dr. GAMAL ALBINSAID**
> Anggota Fraksi PKS DPR RI Jawa Timur V

Terima Kunjungan RSA,

Yanuar Arif Dorong Regulasi Berkendara Lebih Komprehensif

Jakarta (4/3) – Anggota DPR RI Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, menerima audiensi dari Road Safety Association (RSA) di Ruang Rapat Inbang Fraksi PKS, Gedung Nusantara I, Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta pada Selasa (4/3)

Dalam pertemuan ini, RSA menyampaikan aspirasi terkait keselamatan berkendara serta mendorong adanya regulasi yang lebih komprehensif untuk menekan angka kecelakaan di jalan raya.

Ketua Umum RSA, Rio Octaviano, mengungkapkan keprihatinannya terhadap tingginya angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Berda-sarkan data Korlantas Polri 2024, setiap jamnya rata-rata tiga nyawa melayang akibat kecelakaan di jalan.

"Kami sangat berterima kasih atas kesempatan audiensi ini. Fokus kami adalah bagaimana ke depan angka kematian akibat kecelakaan berkendara dapat berkurang. Saat ini, kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab kematian terbesar dibandingkan narkoba atau bencana alam. Sayangnya, belum ada badan khusus yang menangani secara langsung seperti BNN untuk narkoba atau BNPB untuk bencana," jelas Rio.

Menurutnya, tumpang tindih kepentingan dan aturan di lapangan menyebabkan ketidakjelasan regulasi, sehingga sulit menertibkan pelanggaran yang terjadi. RSA berharap adanya regulasi yang lebih komprehensif untuk memperjelas aturan dan menekan angka kecelakaan.

Dr. Kyatmaja turut menyoroti permasalahan keselamatan dalam industri angkutan, terutama terkait truk Over Dimension Over Loading (ODOL).

"Rata-rata pengusaha angkutan adalah bisnis keluarga, sehingga profesionalisme dalam manajemen keselamatan kurang diperhatikan. Kita dihadapkan pada dua sisi: kepentingan bisnis atau keselamatan. Sayangnya, yang lebih sering dikedepankan adalah kepentingan bisnis," ujarnya.

Ia menyoroti bahwa aturan yang belum maksimal menyebabkan banyak pelanggaran di lapangan. Contohnya, truk ODOL di Indonesia bisa melanggar hingga 100% dari ketentuan berat muatan yang diizinkan. Selain itu, jika terjadi kecelakaan, sopir sering kali dijadikan pihak yang paling bertanggung jawab, padahal pengusaha juga memiliki peran besar dalam penyediaan kendaraan yang aman.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Anggota Komisi V DPR RI, Yanuar Arif menyatakan bahwa DPR RI memahami kompleksitas permasalahan keselamatan berkendara. Ia pun membuka kesempatan bagi RSA untuk turut serta dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Kami sadar bahwa masalah ini sangat kompleks, mulai dari tumpang tindih aturan hingga banyaknya ego sektoral. Oleh karena itu, kami mengundang teman-teman RSA untuk ikut serta dalam pembahasan revisi UU No. 22 Tahun 2009. InsyaAllah saya akan meminta pimpinan Komisi V DPR RI untuk menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan RSA," ujar Yanuar.

Yanuar juga meminta RSA untuk menyiapkan poin-poin usulan konkret yang nantinya bisa dimasukkan dalam revisi undang-undang tersebut.

Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan langkah konkret dapat segera diambil untuk meningkatkan keselamatan berkendara di Indonesia dan menekan angka kecelakaan di jalan raya.

> "Kami sadar bahwa masalah ini sangat kompleks, mulai dari tumpang tindih aturan hingga banyaknya ego sektoral. Oleh karena itu, kami mengundang teman-teman RSA untuk ikut serta dalam pembahasan revisi UU No. 22 Tahun 2009.
>
> **H. YANUAR ARIF WIBOWO, S.H.**
> Anggota Komisi V DPR RI

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

Turut Berduka Cita

Keluarga Besar Fraksi PKS DPR RI
Turut Berduka Atas wafatnya

KH. Abdul Ghani Kasuba

Gubernur Maluku Utara 2014 - 2023

Semoga Allah SWT menerima
amal ibadahnya serta
menempatkannya di tempat
terbaik Jannah-Nya
Amin

image istimewa

Demi Tata Dunia Adil sesuai Usulan Erdogan,

HNW: Sudah Semestinya Negara Mayoritas Muslim Miliki Hak Veto di DK PBB

Jakarta (05/03) --- Anggota Komisi VIII DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, mendukung dan mengapresiasi gagasan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan terkait perlunya ada keadilan dan keterwakilan bagi negara bermayoritas penduduk muslim untuk memiliki hak veto dan duduk sebagai anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB).

"Apa yang diusulkan oleh Presiden Erdogan agar ada negara yang mayoritas warganya beragama Islam sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB itu sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang diterima secara internasional sebagai prinsip penting dalam demokrasi yang diserukan oleh negara-negara Barat. Hal tersebut dapat menyegarkan menuju tatanan dunia baru yang betul-betul berdasarkan nilai-nilai peradaban unggulan antara lain dengan diterapkannya prinsip keadilan, kesetaraan dan keterwakilan," ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (04/03/2025).

HNW sapaan akrabnya mengatakan bahwa gagasan tersebut perlu dibahas secara serius, dan ditindaklanjuti hingga berhasil diwujudkan secara bersama-sama negara-negara muslim di dunia, terutama di dalam forum Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan PBB.

"Dan Indonesia, sebagai salah satu negara berpenduduk muslim terbesar di dunia sudah selayaknya ikut memperjuangkan gagasan yg bisa mereformasi tatanan dunia ini," ujarnya

Sebagai informasi, pada Minggu (02/03/2025) dalam buka bersama dengan sejumlah duta besar di Ankara, Turki, Presiden Erdogan menyampaikan gagasan reformasi dewan keamanan PBB tersebut. Ia menilai bahwa adanya perwakilan negara muslim sebagai anggota tetap dan memiliki hak veto di organ paling berpengaruh di PBB itu bukan hanya dibutuhkan, tetapi juga suatu kewajiban. Saat ini hanya ada 5 anggota tetap DK PBB yang memiliki hak veto, yakni China, Perancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat.

HNW sepakat dengan

BERIKUTNYA »»

Demi Tata Dunia Adil sesuai Usulan Erdogan, HNW: Sudah Semestinya Negara Mayoritas Muslim Miliki Hak Veto di DK PBB

SEBELUMNYA

slogan 'World is bigger than five' (dunia ini lebih besar dari sekadar lima negara tersebut). Bahkan, berdasarkan pada 2024 lalu, jumlah populasi muslim adalah seperempat dari penduduk dunia. Selain itu, representasi negara-negara Muslim juga sangat besar di PBB, sehingga perlu memperoleh kedudukan yang layak.

Saat ini, lanjutnya, ada 193 negara anggota PBB ditambah dengan dua negara pengamat non-anggota, yakni Palestina dan Vatikan. Sedangkan, jumlah negara anggota OKI adalah 57 negara anggota (termasuk Palestina).

"Jadi, representasi negara OKI di PBB mencapai hampir 30 persen," ujarnya.

Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap agar Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dapat segera bergerak bersama dengan negara sahabat, dan bila perlu membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti dan menyukseskan gagasan tersebut.

"Adanya ketidakadilan dan ketidakterwakilan, padahal situasi geopolitik di dunia yang semakin dinamis tapi mengkhawatirkan ini, seharusnya bisa dijadikan momentum untuk mereformasi keanggotaan tetap DK PBB. Dan Indonesia, sesuai dengan amanat konstitusi, penting bisa memainkan perannya dalam menghadirkan keadilan dan perdamaian abadi di dunia antara lain dengan mereformasi keanggotaan DK PBB agar ada perwakilan dari negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam sebagaimana diusulkan Presiden Turki, Erdogan," pungkasnya.

image istimewa

"Adanya ketidakadilan dan ketidakterwakilan, padahal situasi geopolitik di dunia yang semakin dinamis tapi mengkhawatirkan ini, seharusnya bisa dijadikan momentum untuk mereformasi keanggotaan tetap DK PBB. Dan Indonesia, sesuai dengan amanat konstitusi, penting bisa memainkan perannya dalam menghadirkan keadilan dan perdamaian abadi di dunia

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A
Anggota Komisi VIII DPR RI

Kunjungi Kanal Resmi Fraksi PKS DPR RI

Website
fraksi.pks.id
Instagram
@fraksipksdprri
Twitter
@FPKSDPRRI
Facebook
Fraksi PKS DPR RI
Youtube
PKSTV DPR RI
Tiktok
@fraksipksdprri

Nantikan Setiap Pekan